



## BAB II

# CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro di Kota Mojokerto tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,04	78,43	0,39
2.	Angka Kemsikinan	6,24	6,39	0,15%
3.	Angka Pengangguran	6,74	6,87	0,13%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-3,69	3,65	7,34%
5.	Pendapatan Per Kapita	49.840.000	52.041.000	4,42%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,355	0,334	(5,92)

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

#### 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang dibuat lebih dari satu indeks yang digabung menjadi indeks tunggal. Indeks ini penting untuk melihat sampai seberapa jauh pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan mampu secara nyata memberikan output berupa peningkatan kebutuhan fisik dasar manusia dan perluasan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan. Agak berbeda dengan Indeks Mutu Hidup (IMH) yang berfungsi sebagai indikator fisik (mengukur tingkat kemajuan), maka IPM cenderung berfungsi sebagai indikator posisi (membandingkan keberhasilan pembangunan antar waktu atau wilayah). Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia, IPM dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua aspek:

1. Untuk perbandingan antar wilayah yang memperlihatkan posisi suatu wilayah relatif



terhadap wilayah yang lain berdasarkan besaran IPM yang disusun dalam suatu peringkat dari kemajuan pembangunan manusia di berbagai wilayah dalam kawasan yang sama.

2. Untuk mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen yaitu :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat, diukur dengan indeks kesehatan;
2. Pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lamanya sekolah yang kemudian dinilai dengan indeks pendidikan; dan
3. Standar Hidup Layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP rupiah).

Pada penghitungan IPM dengan metode baru, bahwa untuk mengukur tingkat kemajuan dan pencapaian pembangunan manusia terhadap sasaran ideal ( $IPM=100$ ) dapat dilihat dari indikator pertumbuhan IPM. Laju pertumbuhan IPM menunjukkan seberapa besar peningkatan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia pada suatu wilayah dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam pengertian sehari-hari pertumbuhan IPM bisa dikatakan sebagai suatu kepekaan terhadap perlakuan yang diberikan berkaitan dengan pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM pada suatu wilayah, maka semakin cepat kenaikan IPM yang berhasil diraih dalam periode satu tahun tersebut.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Untuk itu *UNDP* memberikan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Kelompok Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Tingkatan Status	Kelompok
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$

Sumber: UNDP

Penyajian Indeks Pembangunan Manusia antar waktu, sangat bermakna karena mampu memperlihatkan kemajuan maupun kemunduran dari status capaian IPM itu sendiri. Sementara, untuk melihat sejauh mana tingkat kemajuan IPM dapat digunakan indikator pertumbuhan IPM yang menunjukkan perubahan antar waktu.



**Tabel 2. 3 IPM Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 - 2021**

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	78,70	79,50	80,05	80,29	80,65
Kabupaten Mojokerto	72,36	72,64	73,53	73,83	74,15
Kabupaten Lamongan	71,11	71,97	72,57	72,58	73,12
Kabupaten Gresik	74,84	75,28	76,10	76,11	76,50
Kabupaten Bangkalan	62,30	62,87	63,79	64,11	64,36
Kota Mojokerto	76,77	77,14	77,96	78,04	78,43
Kota Surabaya	81,07	81,74	82,22	82,23	82,31
<b>Prov Jawa Timur</b>	<b>70,27</b>	<b>70,77</b>	<b>71,50</b>	<b>71,71</b>	<b>72,14</b>
<b>Indonesia</b>	<b>70,81</b>	<b>71,39</b>	<b>71,92</b>	<b>71,94</b>	<b>72,29</b>

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Pembangunan manusia di Kota Mojokerto dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan. Tahun 2017 IPM Kota Mojokerto sebesar 76,77 dan meningkat menjadi 78,43 di pada 2021. Selama kurun waktu lima tahun, IPM Kota Mojokerto selalu dalam kategori Tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang terkait sumber daya manusia oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto tetap konsisten bahkan semakin baik, terbukti dari tahun ke tahun mampu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Kota Mojokerto.

### 2.1.2 Angka Kemiskinan

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin wilayah Gerbangkertosusila, Jawa Timur, dan Nasional tahun 2017 – 2021. Pada tahun 2017 – 2019 angka kemiskinan Kota Mojokerto menurun, namun sejak tahun 2020 hingga 2021 meningkat tajam. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang



menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga menghambat roda perekonomian. Kelompok paling rentan yang terjun di bawah garis kemiskinan ialah pekerja informal. Hal ini terjadi karena pekerja informal berbeda dengan kelompok formal yang dapat bekerja di rumah.

**Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 – 2021 (000 jiwa)**

Wilayah	2017		2018		2019		2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kabupaten Sidoarjo	135,4	6,23	125,75	5,69	119,29	5,32	127,05	5,59	137,15	5,93
Kabupaten Mojokerto	111,79	10,19	111,55	10,08	108,81	9,75	118,80	10,57	120,54	10,62
Kabupaten Lamongan	171,38	14,42	164,00	13,80	157,11	13,21	164,68	13,85	166,82	13,86
Kabupaten Gresik	164,08	12,80	154,02	11,89	148,61	11,35	164,05	12,40	166,35	12,42
Kabupaten Bangkalan	206,53	21,32	191,33	19,59	186,11	18,90	204,00	20,56	215,97	21,57
Kota Mojokerto	7,28	5,73	7,04	5,50	6,63	5,15	8,09	6,24	8,37	6,39
Kota Surabaya	154,71	5,39	140,81	4,88	130,55	4,51	145,67	5,02	152,49	5,23
<b>Prov Jawa Timur</b>	<b>4.617</b>	<b>11,77</b>	<b>4.332</b>	<b>10,98</b>	<b>4.112</b>	<b>10,37</b>	<b>4.419</b>	<b>11,09</b>	<b>4.259</b>	<b>10,59</b>
<b>Indonesia</b>	<b>27.771</b>	<b>10,64</b>	<b>25.950</b>	<b>9,82</b>	<b>25.145</b>	<b>9,41</b>	<b>26.424</b>	<b>9,78</b>	<b>26.503</b>	<b>9,71</b>

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi isu regional, melainkan telah menjadi isu global. Presiden telah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, pemberlakuan PPKM menghambat giat ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Mojokerto melakukan kolaborasi dan sinergitas yang kuat antar sektor. Banyak penduduk Kota Mojokerto di sektor perdagangan dan jasa, serta tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sejak tahun 2020 lalu Pemerintah Kota Mojokerto secara masif telah mengadakan program Inkubasi Wirausaha sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Minimnya sektor pertanian di Kota Mojokerto, membuat pemerintah melakukan upaya intervensi melalui program-program pada sektor perdagangan, sektor jasa, serta konstruksi.



### 2.1.3 Angka Pengangguran

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, serta besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

**Tabel 2. 5 TPT dan TPAK Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 - 2021**

Wilayah	2017		2018		2019		2020		2021	
	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK	TPT	TPAK
Kabupaten Sidoarjo	4,97	64,54	4,73	64,53	4,72	66,82	10,97	67,17	10,87	66,47
Kabupaten Mojokerto	5,00	73,23	4,27	71,91	3,68	69,35	5,75	69,79	5,54	70,47
Kabupaten Lamongan	4,12	68,65	3,17	68,02	4,00	68,89	5,13	70,81	4,90	70,72
Kabupaten Gresik	4,54	68,04	5,82	67,29	5,54	65,65	8,21	66,53	8,00	69,43
Kabupaten Bangkalan	4,48	68,07	5,25	68,86	5,84	63,11	8,77	67,00	8,07	68,66
Kota Mojokerto	3,61	68,65	2,45	69,19	2,65	64,88	6,74	68,21	6,87	67,09
Kota Surabaya	5,98	66,36	6,12	66,98	5,87	68,61	9,79	68,05	9,68	67,30
<b>Jawa Timur</b>	<b>4,00</b>	<b>68,78</b>	<b>3,91</b>	<b>69,37</b>	<b>3,82</b>	<b>69,45</b>	<b>5,84</b>	<b>70,33</b>	<b>5,74</b>	<b>70,00</b>
<b>Indonesia</b>	<b>5,50</b>	<b>66,67</b>	<b>5,30</b>	<b>67,31</b>	<b>5,23</b>	<b>67,53</b>	<b>7,07</b>	<b>67,77</b>	<b>6,49</b>	<b>67,80</b>

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

TPT di Kota Mojokerto pada tahun 2021 kembali naik menjadi 6,87 persen sejak tahun 2020. Kenaikan di tahun 2021 relatif kecil hanya berkisar 0,13 persen jika dibandingkan



kenaikan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,09 persen. Fenomena kenaikan TPT pada tahun 2020 terjadi hampir pada semua wilayah di Indonesia. Hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang meruntuhkan semua aspek kehidupan dari sisi sosial maupun ekonomi. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya TPT Kota Mojokerto menunjukkan trend menurun, dimana menumbuhkan optimisme bagi masyarakat Kota Mojokerto untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Capaian TPT Kota Mojokerto berbanding terbalik dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. TPAK Kota Mojokerto tahun 2020 sebesar 68,21 persen menjadi 67,09 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,12 persen poin pada tahun 2021. Angka TPAK Kota Mojokerto masih di bawah TPAK Jawa Timur dan TPAK nasional.

#### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu cara untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut pendekatan produksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor atau sektor.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/ pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/ deflasi. Penghitungan PDRB yang berlaku saat ini sudah menggunakan metode baru dan mengalami perubahan tahun dasar yaitu menggunakan tahun dasar 2010. Berikut disajikan perkembangan nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai berikut.

**Tabel 2. 6 Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37 964,1	39 566,0	39 888,7	43 570,9	41 385,3
Pertambangan dan Penggalan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri Pengolahan	669 352,0	734 546,3	776 431,7	749 658,1	785 113,7
Pengadaan Listrik dan Gas	4 448,0	4 766,0	5 124,0	5 133,9	5 319,9



Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6 276,1	6 580,3	6 854,0	7 197,0	7 722,1
Konstruksi	635 252,4	675 545,2	711 455,2	672 366,7	684 995,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 732 507,9	1 913 304,3	2 054 344,0	1 879 171,9	2 040 288,0
Transportasi dan Pergudangan	157 883,7	171 105,4	186 531,6	173 616,2	185 180,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	402 044,4	440 026,1	482 111,8	451 710,1	483 906,3
Informasi dan Komunikasi	692 159,0	737 483,2	794 651,6	856 829,1	909 916,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	484 930,2	522 589,7	554 573,2	552 938,2	573 268,3
Real Estate	160 951,1	174 732,6	185 375,7	193 995,7	194 867,8
Jasa Perusahaan	45 875,9	50 484,1	54 136,7	50 843,9	51 585,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	274 567,7	302 621,6	334 206,7	336 248,3	335 356,8
Jasa Pendidikan	266 872,9	282 483,1	304 143,4	318 422,7	319 064,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69 182,2	73 291,8	79 159,7	86 878,8	92 348,5
Jasa Lainnya	207 967,2	224 745,0	240 342,0	209 496,3	225 314,1
<b>PDRB</b>	<b>5 848 234,7</b>	<b>6 353 870,7</b>	<b>6 809 330,0</b>	<b>6 588 057,7</b>	<b>6 935 632,3</b>

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Keterangan : \*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

**Tabel 2. 7 Perkembangan Nilai PDRB Kota Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25 355,7	25 551,2	25 158,6	27 210,4	26 554,3
Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industri Pengolahan	479 254,5	506 999,5	525 863,8	503 810,5	518 811,7
Pengadaan Listrik dan Gas	3 996,8	4 191,6	4 453,3	4 438,4	4 551,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5 837,9	6 085,0	6 381,5	6 661,5	7 072,2
Konstruksi	483 704,0	511 849,4	541 446,0	507 533,1	511 896,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 327 943,0	1 410 378,0	1 493 486,1	1 355 601,4	1 444 303,0
Transportasi dan Pergudangan	115 047,8	122 207,6	131 717,6	123 346,2	130 523,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281 231,9	303 425,8	327 021,8	300 346,2	304 716,1
Informasi dan Komunikasi	644 050,1	685 621,5	735 246,5	792 049,0	836 423,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	325 381,6	340 463,9	355 622,7	355 686,8	357 491,5

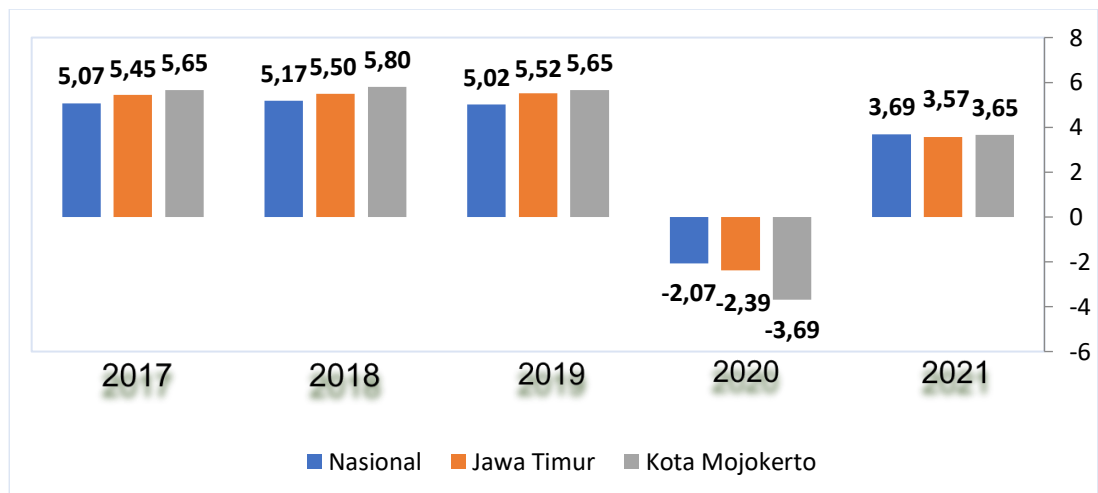


Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
Real Estate	123 842,6	128 755,6	133 952,3	138 337,6	138 684,6
Jasa Perusahaan	33 001,9	34 764,2	36 631,3	33 977,5	34 273,0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	199 252,2	208 050,2	216 931,6	211 685,2	211 252,3
Jasa Pendidikan	192 720,4	200 803,1	213 157,2	219 292,2	219 975,0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	52 714,5	55 684,8	59 021,0	63 777,6	66 289,8
Jasa Lainnya	167 110,0	174 401,0	184 587,1	157 814,0	163 671,5
<b>PDRB</b>	<b>4 460 444,9</b>	<b>4 719 232,4</b>	<b>4 990 678,5</b>	<b>4 801 464,0</b>	<b>4 976 489,76</b>
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>5,65</b>	<b>5,80</b>	<b>5,65</b>	<b>-3,69</b>	<b>3,65</b>

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

Keterangan : \*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara



**Gambar 2. 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2017-2021**

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022, diolah

Selama tahun 2017-2021, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar 5,65%, menguat menjadi 5,80% di tahun 2019, melambat pada tahun 2019, dan menurun tajam di angka -3,69% di tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali menguat di angka 3,65%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 meskipun di atas Jawa Timur, namun masih di bawah ekonomi nasional. Seiring dengan melambatnya ekonomi global yang berdampak terhadap hampir seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih bertahan pada level pertumbuhan 5,25% pada tahun 2019, berkontraksi pada tahun 2020 di angka -2,39% dan kembali meningkat menjadi 3,57% di tahun 2021. Tidak berbeda dengan kondisi ekonomi Kota Mojokerto dan





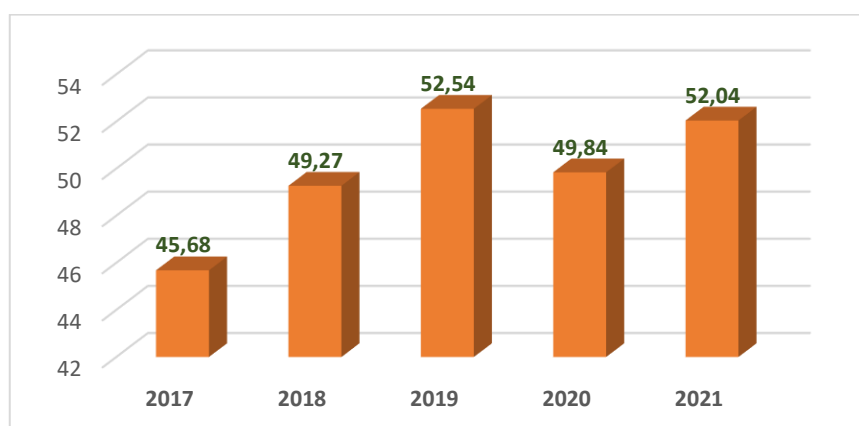
Jawa Timur, kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 juga menurun tajam hingga -2,07% dan kembali menguat di angka 3,69% di tahun 2021.

### 2.1.5 PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para pemerhati yang berkecimpung dalam penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat. PDRB per kapita adalah nilai nominal PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sehingga besaran nilainya sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita suatu wilayah. Oleh sebab itu, laju pertumbuhan penduduk idealnya tidak melebihi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah mengindikasikan semakin baik tingkat perekonomian wilayah tersebut, meskipun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Walaupun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro. Dan data PDRB sebagai indikator makro ekonomi dapat digunakan sebagai acuan melihat kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa yang berada di wilayah tersebut.

Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, karena PDRB per kapita selain dipengaruhi faktor produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Namun gambaran tersebut tidak dapat langsung dijadikan sebagai ukuran peningkatan ekonomi maupun penyebaran di setiap strata ekonomi karena pengaruh inflasi sangat dominan dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Berlaku.



**Gambar 2. 2 PDRB Per Kapita Kota Mojokerto 2017 – 2021 (Juta Rupiah)**

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022, diolah



Dari grafik di atas memperlihatkan PDRB per kapita Kota Mojokerto periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 PDRB per kapita Kota Mojokerto telah mencapai sekitar 45,68 juta rupiah. Tahun 2018 dan 2019 PDRB per kapita Kota Mojokerto berturut-turut mencapai 49,27 dan 52,54 juta rupiah. Selama tahun 2020 PDRB per kapita Kota Mojokerto menjadi 49,84 juta rupiah atau turun sebesar 2,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini merupakan indikasi bahwa hingga tahun 2019 umumnya kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto membaik setiap tahun. Namun pada tahun 2020 menurun sebagai akibat pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pada tahun 2021 PDRB per kapita Kota Mojokerto kembali menguat menjadi 52,04 atau meningkat sebesar 2,97 persen. Hal ini terjadi karena sinergi pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kota Mojokerto yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta bukti keberhasilan penanganan pandemi covid-19 di wilayah Kota Mojokerto sehingga roda perekonomian kembali bergerak.

Jika dibandingkan dengan Nasional, Jawa Timur, dan daerah sekitar wilayah Gerbangkertosusila, maka posisi PDRB per kapita Kota Mojokerto ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 8 PDRB Per Kapita Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 – 2021**

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	79,74	85,29	90,62	86,22	100,69
Kabupaten Mojokerto	64,44	69,14	73,65	72,65	77,53
Kabupaten Lamongan	28,91	31,10	33,11	32,58	30,26
Kabupaten Gresik	86,29	100,19	105,68	101,06	109,37
Kabupaten Bangkalan	22,32	24,35	24,98	23,40	23,01
Kota Mojokerto	45,94	49,27	52,54	49,84	52,04
Kota Surabaya	172,20	186,76	200,36	190,66	204,92
<b>Prov Jawa Timur</b>	<b>51,38</b>	<b>55,41</b>	<b>59,19</b>	<b>57,55</b>	<b>60,04</b>
<b>Indonesia</b>	<b>51,88</b>	<b>56,17</b>	<b>59,32</b>	<b>57,25</b>	<b>62,23</b>

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022



### 2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna), sehingga nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Indikator ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu wilayah. Gini Ratio Kota Mojokerto tahun 2017 tercatat 0,39. Selanjutnya tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi 0,341 dan 0,309. Namun pada tahun 2020 indikator ini kembali meningkat menjadi 0,355. Rata-rata pendapatan penduduk yang menurun selama pandemi Covid-19 memperlebar jurang antara penduduk miskin dan non miskin, yang berarti memperdalam ketimpangan pendapatan antar penduduk. Dan di tahun 2021 koefisien Gini Kota Mojokerto menurun kembali menjadi 0,334.

Bila dibandingkan dengan angka koefisien Gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka Gini Ratio Kota Mojokerto lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa tingkat pemerataan pendapatan antar penduduk di Kota Mojokerto masih lebih baik daripada Jawa Timur maupun nasional.

**Tabel 2. 9 Gini Rasio Nasional, Jawa Timur, dan Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2017 - 2021**

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	0,34	0,346	0,311	0,340	0,347
Kabupaten Mojokerto	0,32	0,306	0,270	0,325	0,294
Kabupaten Lamongan	0,32	0,313	0,319	0,296	0,292
Kabupaten Gresik	0,29	0,270	0,282	0,299	0,313
Kabupaten Bangkalan	0,3	0,287	0,314	0,322	0,303
Kota Mojokerto	0,39	0,341	0,309	0,355	0,334
Kota Surabaya	0,39	0,358	0,406	0,344	0,351
<b>Prov Jawa Timur</b>	<b>0,396</b>	<b>0,379</b>	<b>0,370</b>	<b>0,366</b>	<b>0,374</b>
<b>Indonesia</b>	<b>0,393</b>	<b>0,389</b>	<b>0,382</b>	<b>0,385</b>	<b>0,381</b>

Sumber: BPS Kota Mojokerto, 2022

## 2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.



Indikator kinerja urusan pemerintahan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui: a) Indikator Kinerja Kunci Keluaran; b) Indikator Kinerja Kunci Hasil; dan c) Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan. Capaian masing-masing indikator kinerja kunci secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>			
	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	97	DISDIKBUD	
	jumlah peserta didik paud yang menerima perleng kapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	4.752	DISDIKBUD	
	jumlah peserta didik paud yang menerima pembebas an biaya pendidikan	200	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	405	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada PAUD	426	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	124	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	40	DISDIKBUD	
	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	77	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.505	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	8.277	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.697	DISDIKBUD	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	6.460	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	222	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	525	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	710	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	525	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	222	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	188	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	222	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	305	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	284	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	53	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	15	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	139	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	139	DISDIKBUD	
	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	77	DISDIKBUD	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.505	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	8.277	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.697	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6.460	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	593	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	525	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	710	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	525	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	222	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	169	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	222	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	169	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	305	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	284	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	53	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	15	DISDIKBUD	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	200	DISDIKBUD	
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	91	DISDIKBUD	
	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	0	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	140	DISDIKBUD	
	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	100	DISDIKBUD	
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	28	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	28	DISDIKBUD	
	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	25	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	DISDIKBUD	
	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	1	DISDIKBUD	
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>			
	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	6 RS Rujukan	DINKESP2KB	
	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6 RS	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	92,6%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	110	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	97,1%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	110	DINKESP2KB	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	98,6%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	135	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	212	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan an anak usia pendidikan dasar sesuai standar	194	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	86,9%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	125	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	93,2%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	202	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	80,1%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	136	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	140	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	140	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	146	DINKESP2KB	
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100%	DINKESP2KB	





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	146	DINKESP2KB	
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
	1. Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	557	DPUPRPERAKIM	
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	11.856	DPUPRPERAKIM	
	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenang an Kab/Kota (ha)	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/pengelolaan SD Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak	DPUPRPERAKIM	
	6. Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak	DPUPRPERAKIM	
	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	DPUPRPERAKIM	
	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPUPRPERAKIM	
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DPUPRPERAKIM	
	3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	DPUPRPERAKIM	
	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0/1	DPUPRPERAKIM	
	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerin tah kabupaten/kota	0	DPUPRPERAKIM	
	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	0/1	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0/1	DPUPRPERAKIM	
	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	97,04%	DPUPRPERAKIM	
	1. Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Tidak	DPUPRPERAKIM	
	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Tidak	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	DPUPRPERAKIM	
	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	97,64 %	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	0	DPUPRPERAKIM	
	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	98,63%	DPUPRPERAKIM	
	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	98,63%	DPUPRPERAKIM	
	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	100%	DPUPRPERAKIM	
	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	100%	DPUPRPERAKIM	
	10. Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	9,63%	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100%	DPUPRPERAKIM	
	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100%	DPUPRPERAKIM	
	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100%	DPUPRPERAKIM	
	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	8,44%	DPUPRPERAKIM	
	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	13,12%	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	190 Izin	DPUPRPERAKIM	
	3. Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	DPUPRPERAKIM	
	4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	1	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	63 Gedung	DPUPRPERAKIM	
	6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	63 Gedung	DPUPRPERAKIM	
	7. Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kab/Kota	63 Gedung	DPUPRPERAKIM	
	8. Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	63 Gedung	DPUPRPERAKIM	
	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kab/Kota	185.825 Km	DPUPRPERAKIM	
	2. Panjang jalan yang dibangun	3 Km	DPUPRPERAKIM	
	3. Panjang jembatan yang dibangun	1089,20	DPUPRPERAKIM	
	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	730 M	DPUPRPERAKIM	
	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	1089,20	DPUPRPERAKIM	
	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	5.151 M	DPUPRPERAKIM	
	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	4 Buah	DPUPRPERAKIM	
	8. Panjang jalan yang dipelihara	4.091 M	DPUPRPERAKIM	
	9. Panjang jembatan yang dipelihara	22 Buah	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0 (Tidak ada)	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	96 Orang	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	30 Orang	DPUPRPERAKIM	
	4. Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	DPUPRPERAKIM	
	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	DPUPRPERAKIM	
	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	DPUPRPERAKIM	
	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	DPUPRPERAKIM	
	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	DPUPRPERAKIM	
	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/ analis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membina jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	146 Orang	DPUPRPERAKIM	
	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	96 Orang	DPUPRPERAKIM	
	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analis di wilayah kab/kota	96 Orang	DPUPRPERAKIM	
	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Belum ada	DPUPRPERAKIM	
	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPRPERAKIM	
	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kab/Kota	0	DPUPRPERAKIM	
	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	400	DPUPRPERAKIM	
	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPRPERAKIM	
	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	DPUPRPERAKIM	
	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPRPERAKIM	
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>			
	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti	0	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	1. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh = 10-15 Ha	40,16 Ha	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	5.578	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	40,16 Ha	DPUPRPERAKIM	
	1. Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	7	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah pengembang yang tersertifikasi		DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah pengembang yang teregistrasi	1	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	9	DPUPRPERAKIM	
	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DPUPRPERAKIM	
	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	DPUPRPERAKIM	
	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	58 Unit / 1 Tower Rusunawa	DPUPRPERAKIM	
	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	DPUPRPERAKIM	
	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DPUPRPERAKIM	
	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	40,16 Ha	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	5.578	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	40,16 Ha	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah rumah di kab/kota	42.500	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	5.578	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah rumah tidak layak huni	5.578	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	DPUPRPERAKIM	
	Rasio rumah dan KK	0	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah rumah pembangunan baru	0	DPUPRPERAKIM	
	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	7	DPUPRPERAKIM	
	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	40.271	DPUPRPERAKIM	
	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	10	DPUPRPERAKIM	
	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	42.500	DPUPRPERAKIM	
	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	7	DPUPRPERAKIM	
	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	10	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	1	DPUPRPERAKIM	
	8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	1	DPUPRPERAKIM	
	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	9	DPUPRPERAKIM	
<b>5.</b>	<b>Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	69 Pengaduan Trantibum	SATPOL PP	
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0	SATPOL PP	
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	9 Perda dan Perkada	SATPOL PP	
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 Orang	SATPOL PP	
	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	5 SOP	SATPOL PP	
	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	25 Unit	SATPOL PP	
	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	SATPOL PP	
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	SATPOL PP	
	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	SATPOL PP	
	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%	SATPOL PP	
	3. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	100%	SATPOL PP	
	4. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	100%	SATPOL PP	
	5. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops pe nanggulangan bencana dan sarana prasarana pe nanggulangan bencana	0,01%	SATPOL PP	
	6. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	SATPOL PP	
	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	SATPOL PP	





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	2.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	SATPOL PP	
	3.Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	SATPOL PP	
	4.Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	SATPOL PP	
	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	32	SATPOL PP	
	2. Tersedianya pos sector damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0	SATPOL PP	
	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0	SATPOL PP	
	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0	SATPOL PP	
	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	26 Jenis Sarpras	SATPOL PP	
	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	6 Orang	SATPOL PP	
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	SATPOL PP	
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	22 Orang	SATPOL PP	
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>			
	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2 Layanan data dan aduan	DINSOSP3A	
	2. Jumlah data penyandang penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	66 Orang	DINSOSP3A	
	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1 Tim ( 27 Orang )	DINSOSP3A	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	66 Orang	DINSOSP3A	
	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 Unit roda 4	DINSOSP3A	
	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakaman sesuai standar gizi	66 Orang	DINSOSP3A	
	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2 Unit	DINSOSP3A	
	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	18 Orang	DINSOSP3A	
	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	2 Orang	DINSOSP3A	
	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	4 Buah	DINSOSP3A	
	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	12 Paket	DINSOSP3A	
	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	24 Orang Lanjut Usia Terlantar	DINSOSP3A	
	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	5 Orang	DINSOSP3A	
	14. Jumlah pekerja social professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	159 Orang	DINSOSP3A	
	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	66 Orang	DINSOSP3A	
	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	12 Bulan	DINSOSP3A	
	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	DINSOSP3A	
	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	66 Orang	DINSOSP3A	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar			
	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga	5 Orang	DINSOSP3A	
	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	3 Orang	DINSOSP3A	
	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	5 Orang yang di rujuk ke UPT	DINSOSP3A	
	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	11143 KK	DINSOSP3A	
	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	12 KK korban bencana rumah roboh	DINSOSP3A	
	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 Rumah aman	DINSOSP3A	
	4. Jumlah paket permakaman khusus bagi kelompok rentan	1 Tahun anggaran	DINSOSP3A	
	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	11.143 KK	DINSOSP3A	
	6. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	159 Orang	DINSOSP3A	
<b>7.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>			
	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	Dokumen Rencana Kerja Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2022	DPMPTSPNAKER	
	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	97,55%	DPMPTSPNAKER	
	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	33,33%	DPMPTSPNAKER	
	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	DPMPTSPNAKER	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	35,83%	DPMPTSPNAKER	
	4. Persentase LPK yang terakreditasi	100%	DPMPTSPNAKER	
	5. Persentase LPK yang memiliki	100%	DPMPTSPNAKER	
	6. Jumlah penganggur yang dilatih	100%	DPMPTSPNAKER	
	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	DPMPTSPNAKER	
	8. Persentase penyerapan lulusan	24,32%	DPMPTSPNAKER	
	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	28,57%	DPMPTSPNAKER	
	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	100%	DPMPTSPNAKER	
	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100%	DPMPTSPNAKER	
	Data tingkat produktivitas total	20 Peserta (Peningkat Produktivitas)	DPMPTSPNAKER	
	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	4,44%	DPMPTSPNAKER	
	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	10%	DPMPTSPNAKER	
	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	10 PUK dan 2932 Orang	DPMPTSPNAKER	
	4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur sakal upah	1,27%	DPMPTSPNAKER	
	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	96,24%	DPMPTSPNAKER	
	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	1,27%	DPMPTSPNAKER	
	7. Jumlah mogok kerja	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	8. Jumlah penutupan perusahaan	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	9. Jumlah perselisihan kepentingan	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	11. Jumlah perselisihan PHK	12	DPMPTSPNAKER	
	Jumlah perselisihan PHK	12	DPMPTSPNAKER	
	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	21	DPMPTSPNAKER	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	10	DPMPTSPNAKER	
	14. Lembag Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Ada	DPMPTSPNAKER	
	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	33,33%	DPMPTSPNAKER	
	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	1.678 Orang	DPMPTSPNAKER	
	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	6%	DPMPTSPNAKER	
	4. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja local dalam satu wilayah kab/kota	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	7. Jumlah pernjajian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	17%	DPMPTSPNAKER	
	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Onlien (SISNAKER)	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	1 CPMI/CTKI	DPMPTSPNAKER	
	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	100%	DINSOSP3A	
	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Nihil	DPMPTSPNAKER	
	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Nihil	DPMPTSPNAKER	
<b>8.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>			
	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	49 Lembaga	DINSOSP3A	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	56 Program	DINSOSP3A	
	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Media masa dan Elektronik	DINSOSP3A	
	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 Lembaga	DINSOSP3A	
	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	DINSOSP3A	
	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2 Lembaga	DINSOSP3A	
	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 Lembaga	DINSOSP3A	
	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	3 Lembaga	DINSOSP3A	
	2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	22 Kader	DINSOSP3A	
	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3 Lembaga	DINSOSP3A	
	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 Lembaga	DINSOSP3A	
	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Program	DINSOSP3A	
	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	0	DINSOSP3A	
	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	DINSOSP3A	
<b>9.</b>	<b>Pangan</b>			
	1. tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak	DISKETAPANGTAN	
	2. tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak	DISKETAPANGTAN	
	3. tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	Tidak	DISKETAPANGTAN	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	4. terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	DISKETAPANGTAN	
	5. tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	DISKETAPANGTAN	
	6. tertanganinya kerawanan pangan	Ada	DISKETAPANGTAN	
	7. tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak	DISKETAPANGTAN	
	8. terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	DISKETAPANGTAN	
<b>10.</b>	<b>Pertanian</b>			
	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	100%	DPUPRPERAKIM	
	2. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	100%	DPUPRPERAKIM	
	3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	100%	DPUPRPERAKIM	
	4. Dokumen Izin membuka tanah	100%	DPUPRPERAKIM	
	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100%	DPUPRPERAKIM	
<b>11.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
	1. Hasil Perhitungan provinsi terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks tutupan hutan (ITH)	IKA = 51 ; IKU = 81,38 ; IKL = 27,16	DLH	
	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Total Volume Sampah yang dapat ditangani = 22.418,87 ton ; Total sampah Kabupaten/ Kota= 22.989,25 ton	DLH	
	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	DLH	
	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha	0/126	DLH	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota			
	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0/1	DLH	
	4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0/1	DLH	
	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100%	DLH	
	6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	DLH	
<b>12.</b>	<b>Administrasi Kependudukan</b>			
	1. Penerbitan akta perkawinan	100%	DISPENDUKC APIL	
	2. Penerbitan akta perceraian	100%	DISPENDUKC APIL	
	3. Penerbitan akta kematian		DISPENDUKC APIL	
	4. Penyajian data kependudukan	100%	DISPENDUKC APIL	
<b>13.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0/1	DINSOSP3A	
	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa tahun sebelumnya	0/1	DINSOSP3A	
	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0/1	DINSOSP3A	
	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0/1	DINSOSP3A	
	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0/1	DINSOSP3A	
	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0/1	DINSOSP3A	





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0/1	DINSOSP3A	
	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0/1	DINSOSP3A	
<b>14.</b>	<b>Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>			
	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	DINKESP2KB	
	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	100%	DINKESP2KB	
	3. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	9,04%	DINKESP2KB	
	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	101,67%	DINKESP2KB	
	5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	14 Stakeholder	DINKESP2KB	
	1. Persentase Fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	DINKESP2KB	
	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	43,48%	DINKESP2KB	
	3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	100%	DINKESP2KB	
	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	50,56%	DINKESP2KB	
	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah	0,72%	DINKESP2KB	
	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	100%	DINKESP2KB	
<b>15.</b>	<b>Perhubungan</b>			
	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	88,37%	DISHUB	
	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	94,81%	DISHUB	
	3. Penetapan tariff angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	DISHUB	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	99,25%	DISHUB	
	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	99,25%	DISHUB	
<b>16.</b>	<b>Komunikasi Dan Informatika</b>			
	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DISKOMINFO	
	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	59	DISKOMINFO	
	3. Tersedianya system elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	25	DISKOMINFO	
	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	48%	DISKOMINFO	
	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	84%	DISKOMINFO	
	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	DISKOMINFO	
	4. Persentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	81,48%	DISKOMINFO	
	5. Presentase layanan SPBE (layanan public dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	95,45%	DISKOMINFO	
	6. Presentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	22/22 atau 100%	DISKOMINFO	
	7. Persentase layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah	68,18%	DISKOMINFO	
	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100%	DISKOMINFO	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100%	DISKOMINFO	
	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100%	DISKOMINFO	
	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	DISKOMINFO	
	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	46,55%	DISKOMINFO	
	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	78,26%	DISKOMINFO	
	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	DISKOMINFO	
	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100%	DISKOMINFO	
	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	DISKOMINFO	
	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	DISKOMINFO	
<b>17.</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</b>			
	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	56/112= 50%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3/3 atau 100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	2,15%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	57,53%	DISKOPUKMPERI NDAG	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5,82%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,61%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	4,30%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	90,32%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,30%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,52%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	69,8%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,54%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	51,58%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (ODS)	87,65%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	26,91%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	18,5%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,53%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	7,32%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	31,71%	DISKOPUKMPERI NDAG	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
<b>18. Penanaman Modal</b>				
	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perwali No. 188.45/155/417.111/2020	DPMPTSPNAKER	
	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas intensi penanaman modal	Belum Ada SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	DPMPTSPNAKER	
	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Tidak ada laporan yang dibuat	DPMPTSPNAKER	
	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	12	DPMPTSPNAKER	
	5. Kegiatan pameran penanaman modal	1	DPMPTSPNAKER	
	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	TIDAK ADA kegiatan penerimaan misi penanaman modal	DPMPTSPNAKER	
	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	46	DPMPTSPNAKER	
	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.525	DPMPTSPNAKER	
	9. Laporan realisasi penanaman modal	308.787.600.000	DPMPTSPNAKER	
	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	1	DPMPTSPNAKER	
	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Tidak ada	DPMPTSPNAKER	
	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Ada	DISKOPUKMPERINDAG	
<b>19. Kepemudaan Dan Olahraga</b>				
	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	11	DISPORAPAR	
	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	11	DISPORAPAR	
	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan,	49	DISPORAPAR	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda			
	2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	49	DISPORAPAR	
	1. Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	122 Pelatih	DISPORAPAR	
	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	5 event	DISPORAPAR	
<b>20.</b>	<b>Statistika</b>			
	1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	DISKOMINFO	
	2. Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan	2	DISKOMINFO	
	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	DISKOMINFO	
	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	DISKOMINFO	
	5. Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	DISKOMINFO	
	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	32/32 atau 100%	DISKOMINFO	
	7. Persentase kelengkapan metadata variable dari kegiatan statistik	876/876 atau 100%	DISKOMINFO	
<b>21.</b>	<b>Persandian</b>			
	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	2/2 atau 100%	DISKOMINFO	
	2. Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau apikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	1/1 atau 100%	DISKOMINFO	
	3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	1/1 atau 100%	DISKOMINFO	
	4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	58/58 atau 100%	DISKOMINFO	
<b>22.</b>	<b>Kebudayaan</b>			
	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	11	DISDIKBUD	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	11	DISDIKBUD	
	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	11	DISDIKBUD	
	4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	55	DISDIKBUD	
	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringktan, penghapusan)	13	DISDIKBUD	
	6. Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0 (tidak ada)	DISDIKBUD	
	7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	DISDIKBUD	
	8. Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	DISDIKBUD	
	9. Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	DISDIKBUD	
	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	8514 dan 34 set / toples	DISDIKBUD	
	11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	47 Orang	DISDIKBUD	
	12. Penimngkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	1	DISDIKBUD	
	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	DISDIKBUD	
	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	1	DISDIKBUD	
	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1	DISDIKBUD	
	16. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	6	DISDIKBUD	
	17. Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan pemuseuman Kabupaten/kota	1	DISDIKBUD	
	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2	DISDIKBUD	





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	1	DISDIKBUD	
<b>23.</b>	<b>Perpustakaan</b>			
	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	445,12%	DISPERPUSIP	
	2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	48,80%	DISPERPUSIP	
	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,14%	DISPERPUSIP	
	4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1,48%	DISPERPUSIP	
	5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4 Kegiatan	DISPERPUSIP	
	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	2 Naskah Kuno	DISPERPUSIP	
	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0 Naskah	DISPERPUSIP	
	3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	4 Koleksi	DISPERPUSIP	
<b>24.</b>	<b>Kearsipan</b>			
	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	DISPERPUSIP	
	2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	61%	DISPERPUSIP	
	3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	67,5%	DISPERPUSIP	
	4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	50%	DISPERPUSIP	
	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Ya/Sesuai	DISPERPUSIP	
	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana NSPK	Belum Pernah	DISPERPUSIP	
	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	Ya/Sesuai	DISPERPUSIP	
	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	Ya/Sesuai	DISPERPUSIP	
	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Ya/Sesuai	DISPERPUSIP	





No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK			
	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Tidak Pernah	DISPERPUSIP	
<b>25.</b>	<b>Kelautan Dan Perikanan</b>			
	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	18 Pokdakan belum berbadan hukum 14 Pokdakan sudah berbadan hukum	DISKETAPANGTAN	
	2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0/1	DISKETAPANGTAN	
	3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota yang diterbitkan	2	DISKETAPANGTAN	
	4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan	310 Orang	DISKETAPANGTAN	
	5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	3.860.000 ekor	DISKETAPANGTAN	
<b>26.</b>	<b>Pariwisata</b>			
	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	24 Entitas	DISPORAPAR	
	2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	168 Infrastruktur	DISPORAPAR	
	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	2 TDUP	DISPORAPAR	
	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3.231 Orang	DISPORAPAR	
	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	9 Event	DISPORAPAR	
	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	1 Event	DISPORAPAR	
	7. Jumlah industry pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	20 Industri Pariwisata	DISPORAPAR	
	8. Persentase tenaga kerja di sector pariwisata yang disertifikasi	2,60%	DISPORAPAR	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	9. Persentase SDM peserta pembekalan sector kepariwisataan	86%	DISPORAPAR	
	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	21 Lokasi	DISPORAPAR	
<b>27.</b>	<b>Pertanian</b>			
	1. Sarana pertanian yang diberikan	Benih padi, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan)	DISKETAPANGTAN	
	2. Prasarana pertanian yang digunakan	JUT (jalan usaha tani), bangunan irigasi air tanah dangkal, dam parit	DISKETAPANGTAN	
	3. Penerbitan izin usaha pertanian	3 Izin Usaha	DISKETAPANGTAN	
	4. Persentase prasarana yang digunakan	100%	DISKETAPANGTAN	
	5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100%	DISKETAPANGTAN	
	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0/1	DISKETAPANGTAN	
<b>28.</b>	<b>Kehutanan</b>			
	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0/1	DISKETAPANGTAN	
	2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0/1	DISKETAPANGTAN	
	3. Pemulihan ekosistem pada Tahura	0/1	DISKETAPANGTAN	
	4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0/1	DISKETAPANGTAN	
<b>29.</b>	<b>Energi Dan Sumber Daya Mineral</b>			
	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0/1	Bag. PERKOMSUMDA	
<b>30.</b>	<b>Perdagangan</b>			
	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	2. Persentase penerbitan TDG	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk	0	DPMTPST Tidak ada data, dikarenakan tidak ada dalam Perwali Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pelimpaha Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto	
	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0	DPMTPST	
	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0	DPMTPST	
	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	DPMTPST	
	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota	0	DISKOPUKMPERI NDAG	
	6. Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	DISKOPUKMPERI NDAG	
	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu		DISKOPUKMPERI NDAG	
	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	198,87%	DISKOPUKMPERI NDAG	
<b>31.</b>	<b>Perindustrian</b>			
	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	83,82%	DPMTPST	
	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100%	DISKOPUKMPERI NDAG	



No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	819/819 atau 100%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	2,60%	DISKOPUKMPERI NDAG	
<b>32.</b>	<b>Transmigrasi</b>			
	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0/1	DPMPTSPNAKER	
	2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0/1	DPMPTSPNAKER	
	3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0/1	DPMPTSPNAKER	

### 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>			
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 taun yang berpartisipasi dalam PAUD	100.484%	DISDIKBUD	
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	132.466%	DISDIKBUD	
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 th yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah utama	154.13%	DISDIKBUD	
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99.291%	DISDIKBUD	
<b>2.</b>	<b>Kesehatan</b>			
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0.371%	DINKESP2KB	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	50%	DINKESP2KB	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92.62%	DINKESP2KB	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97.112%	DINKESP2KB	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98.561%	DINKESP2KB	



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100.025%	DINKESP2KB	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	122.51%	DINKESP2KB	
	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	86.85%	DINKESP2KB	
	Persentase warga Negara usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93.15%	DINKESP2KB	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80.10%	DINKESP2KB	
	Persentase penderita DM yng mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	144.07%	DINKESP2KB	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	136.14%	DINKESP2KB	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	120.89%	DINKESP2KB	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	126.34%	DINKESP2KB	
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab.	Tidak Perlu Diisi (Wilayah Sungai Bukan Kewenagnan Pemerintah Kota Mojokerto)	DPUPRPERAKIM	
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab.	Tidak Perlu Diisi (Kota Mojokerto Tidak Memiliki Pantai)	DPUPRPERAKIM	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab. yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	DPUPRPERAKIM	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	94.76%	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98.63%	DPUPRPERAKIM	
	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100%	DPUPRPERAKIM	
	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	95.98%	DPUPRPERAKIM	
	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	DPUPRPERAKIM	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPRPERAKIM	
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat</b>			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Tidak Perlu Diisi (Tidak Terjadi Bencana)	DPUPRPERAKIM	
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	Tidak Perlu Diisi (Tidak Ada Program Relokasi)	DPUPRPERAKIM	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	43,748%	DPUPRPERAKIM	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	13,125%	DPUPRPERAKIM	
	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU Prasarana, Sarana dan Utilias)	6,318 %	DPUPRPERAKIM	
<b>5.</b>	<b>Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP	
	Persentase Perda dan perkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	135 Orang	SATPOL PP	
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	373 Orang	SATPOL PP	
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Tidak Perlu Diisi (Tidak Ada Bencana)	SATPOL PP	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	SATPOL PP	
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14 Menit	SATPOL PP	



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>			
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	DINSOSP3A	
	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.	100%	DINSOSP3A	
<b>7.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>			
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	DPMPTSPNAKER	
	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	33,799%	DPMPTSPNAKER	
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	770.509.51 42,985%	DPMPTSPNAKER	
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	85,664%	DPMPTSPNAKER	
	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	83,313%	DPMPTSPNAKER	
<b>8.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>			
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8,805%	DINSOSP3A	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0.031%	DINSOSP3A	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15,521%	DINSOSP3A	
<b>9.</b>	<b>Pangan</b>			
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	0,177%	DISKETAPANGTAN	
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>			
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DPUPRPERAKIM	
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Tidak Perlu Diisi (Tidak ada kegiatan penetapan)	DPUPRPERAKIM	



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		tanah untuk fasum)		
	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	DPUPRPERAKIM	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absentee	Tidak Perlu Diisi (Tidak ada Tanah Obyek Landreform)	DPUPRPERAKIM	
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Tidak Perlu Diisi (Tidak ada penerbitan izin membuka tanah)	DPUPRPERAKIM	
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Tidak Perlu Disisi (Tidak ada kasus sengketa tanah garapan)	DPUPRPERAKIM	
<b>11.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab	58,08	DLH	
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab	97.51%	DLH	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab	37.5%	DLH	
<b>12.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
	Perekaman KTP elektronik	98.49%	DISPENDUKCAPIL	
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	83.98%	DISPENDUKCAPIL	
	Kepemilikan akta kelahiran	97,955%	DISPENDUKCAPIL	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	50%	DISPENDUKCAPIL	
<b>13.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
	Persentase pengentasan desa tertinggal	1/1 (Tidak memiliki Desa)	Bag. PEM	
	Persentase peningkatan status desa mandiri	1/1 (Tidak memiliki desa)	Bag. PEM	
<b>14.</b>	<b>Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>			





No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,9	DINKESP2KB	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr)	76,335%	DINKESP2KB	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,71%	DINKESP2KB	
<b>15.</b>	<b>Perhubungan</b>			
	Rasio konektivitas kabupaten	100	DISHUB	
	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,493	DISHUB	
<b>16.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DISKOMINFO	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	26,316%	DISKOMINFO	
	Persentase masyarakat yang menjadi saran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	89.65%	DISKOMINFO	
<b>17.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>			
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	74.73%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha	9.38%	DISKOPUKMPERI NDAG	
<b>18.</b>	<b>Penanaman Modal</b>			
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	-11,843%	DPMPTSPNAKER	
<b>19.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>			
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	11.37%	DISPORAPAR	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	32.22%	DISPORAPAR	
	Peningkatan prestasi olahraga	6 Medali	DISPORAPAR	
<b>20.</b>	<b>Statistik</b>			
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO	



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
<b>21.</b>	<b>Persandian</b>			
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	DISKOMINFO	
<b>22.</b>	<b>Kebudayaan</b>			
	Terlestarikannya Cagar Budaya	72,222%	DISDIKBUD	
<b>23.</b>	<b>Perpustakaan</b>			
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63,2%	DISPERPUSIP	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	79%	DISPERPUSIP	
<b>24.</b>	<b>Kearsipan</b>			
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	69,6	DISPERPUSIP	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	66,67	DISPERPUSIP	
<b>25.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota	222.620 kg	DISKETAPANGTAN	
<b>26.</b>	<b>Pariwisata</b>			
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	203.10%	DISPORAPAR	
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	3,092.29%	DISPORAPAR	
	Tingkat hunian akomodasi	23.83%	DISPORAPAR	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	9,65%	DISPORAPAR	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5.80%	DISPORAPAR	
<b>27.</b>	<b>Pertanian</b>			
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	690%	DISKETAPANGTAN	
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	111,111%	DISKETAPANGTAN	
<b>28.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	BUP (Tidak melaksanakan urusan pilihan ESDM)	Bag. PERKOMSUMDA	
<b>29.</b>	<b>Perdagangan</b>			



No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	28.99%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	66,47%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	66,734%	DISKOPUKMPERI NDAG	
<b>30.</b>	<b>Perindustrian</b>			
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota	107.72%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dala, RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	144,59%	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Tidak Perlu Diisi (Tidak Ada Izin Perluasan Industri)	DISKOPUKMPERI NDAG	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Tidak Perlu Diisi (Tidak Ada Izin usaha Kawasan Industri)	DPMT PST (Tidak ada, karena Kota Mojokerto tidak ada Kawasan Industri)	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	75%	DISKOPUKMPERI NDAG	

### 2.2.3. Indikator Kinerja Fungsi untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
<b>1.</b>	<b>Perencanaan Keuangan</b>			
	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	19,601 %	BPKPD	
	Rasio PAD	3,697%	BPKPD	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	76.16 %	BPKPD	
	Opini Laporan Keuangan	10 (1) WTP DPP (4	INSPEKTORAT	



No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		kali) Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014; (2) WDP (1 Kali) Tahun 2013; (3) WTP (5 Kali) Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.		
<b>2.</b>	<b>Pengadaan</b>			
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Bag. PBJ	
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	29,928%	Bag. PBJ	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	60,756%	Bag. PBJ	
<b>3.</b>	<b>Kepegawaian</b>			
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	213,086%	BKPSDM	
	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10.2852%	BKPSDM	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,077 %	BKPSDM	
<b>4.</b>	<b>Manajemen Keuangan</b>			
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	8,5517%	BPKPD	
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	11,4589%	BPKPD	
	Manajemen aset 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya Ya	BPKPD	
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	27.58 %	BPKPD	



No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
5.	<b>Transparansi dan Partisipasi Publik</b>			
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	114.13 %	DISKOMINFO	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100 %	DISKOMINFO	

## 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

### 2.3.1 Analisa Capaian Kinerja

Analisis dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Kota Mojokerto dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Analisis tentang capaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021 disajikan tiap misi dalam uraian berikut:



### 2.3.1.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Indeks Pendidikan

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Pendidikan Tahun 2021

**Tabel 2. 10 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pendidikan Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan							
1.1.1	Indeks Pendidikan	0,732	0,732	0,738	100,82%	0,730	0,731	100,14%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Pendidikan tahun 2021 yaitu 0,738 dengan capaian 100,82%. Dengan demikian meskipun menghadapi pandemi covid-19, pendidikan di Kota Mojokerto diupayakan untuk tetap berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari tabel capaian indikator yang mendukung Indeks Pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 11 Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Pendidikan Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	10,25	10,47	102,15%
		Angka Harapan Lama Sekolah	14	14,01	100,07%
		Prosentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang Memiliki Nilai Akreditasi A	57%	42,29%	74,19%
2	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Minat Baca	62	62,27	100,43%
3	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda yang Berprestasi	71%	71%	100%
4	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Atlet yang Berprestasi	36	42	116%

Sumber: LKJIP Disdikbud, Disperpusip, Disporapar, 2022

Indikator yang pertama adalah Angka Rata – Rata Lama Sekolah. Yang dimaksud dengan angka rata-rata lama sekolah adalah : jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama



sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Prosentase angka rata-rata lama sekolah Kota Mojokerto pada tahun 2021 memiliki target sebesar 10,25 dengan realisasi 10,47 yang artinya secara rata-rata penduduk Kota Mojokerto yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 10,47 tahun atau hampir menamatkan kelas XI. Dan angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2020 dengan angka rata-rata lama sekolah 10,25.

Indikator yang kedua adalah Angka Harapan Lama Sekolah yaitu lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan dari harapan lama sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Perhitungan angka harapan lama sekolah dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia tertentu yang bersekolah pada tahun tertentu, jumlah penduduk usia tertentu pada tahun tertentu, usia dan adanya faktor koreksi. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Mojokerto sebesar 14,01 itu artinya penduduk Kota Mojokerto diharapkan menamatkan pendidikan selama 14,01 tahun atau sampai lulus jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan berkuliah selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan. Angka tersebut sama jika dibanding dengan angka tahun 2020 sebesar 14,01.

Untuk Indikator Prosentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki akreditasi A pada tahun 2021 memiliki target sebesar 57% dan realisasi sebesar 42,29%. Hasil perhitungan tersebut didapat dari perhitungan jumlah nilai akreditasi A untuk lembaga jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dibanding dengan jumlah lembaga keseluruhan di Kota Mojokerto. Capaian untuk indikator Prosentase PAUD, SD/MI dan SMP/MTs sebesar 74,19 % yang mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 77,79 %, Hal ini dikarenakan ada kebijakan terkait anggaran kegiatan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga kegiatan akreditasi tidak dapat dilaksanakan.

Indikator Indeks Minat Baca Tahun 2021 target 62 % realisasi 62,27 % tingkat capaian kinerja di atas 100 %. Pengumpulan data perhitungan dilakukan melalui survei pembaca dan/atau pengunjung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut: (Total Skor : Jumlah Pertanyaan : (Skor tertinggi x Jumlah



Responden) x 100%) dengan rincian total skor sejumlah 11448, jumlah pertanyaan sejumlah 12 item, skor tertinggi sejumlah 4, jumlah responden sejumlah 383. Maka, perhitungan Indeks Minat Baca pada Tahun 2021 adalah  $11448 : 12 : (4 \times 383) \times 100\% = 62,27\%$ .

Indikator Persentase Pemuda yang Berprestasi pada tahun 2021 ditargetkan mencapai 71 %. Sehingga bila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja utama persentase pemuda yang berprestasi tahun 2021 sebesar 71%, maka capaian kerjanya mencapai 100 %.

Indikator Jumlah Atlet yang Berprestasi diukur dengan menghitung jumlah atlet yang berprestasi tingkat kota, propinsi, nasional maupun internasional yang telah difasilitasi oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Mojokerto pada tahun anggaran berjalan. Pada Tahun 2021 realisasi atlet berprestasi sebanyak 42 atlet dengan target 36 atlet. Sehingga ketika realisasi kinerja jumlah atlet berprestasi ditahun 2021 sebanyak 42 atlet, maka capaian kerjanya mencapai 116 % atau sangat berhasil.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator Indeks Pendidikan antara lain:

- a) Belum meratanya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD;
- b) Sarana dan Prasarana Pendidikan yang belum sesuai standar dan belum merata pada lembaga satuan pendidikan;
- c) Belum meratanya motivasi siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (dikarenakan faktor ekonomi);
- d) Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum optimal;
- e) Pemetaan Pendidik yang belum merata;
- f) Masih terdapat lembaga satuan pendidikan yang belum terakreditasi ataupun sudah terakreditasi tetapi masih belum optimal;
- g) Belum optimalnya aplikasi perpustakaan INLISLITE dalam meningkatkan layanan sirkulasi perpustakaan;
- h) Belum optimalnya preservasi dan konservasi bahan pustaka;
- i) Belum optimalnya promosi layanan baru KOMOLIB pada masyarakat;
- j) Belum adanya tim Gerakan Masyarakat Minat Baca.

Adapun upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pendataan dan monitoring evaluasi terkait kondisi dan kebutuhan sarana prasarana lembaga satuan pendidikan untuk segera ditindak lanjuti baik





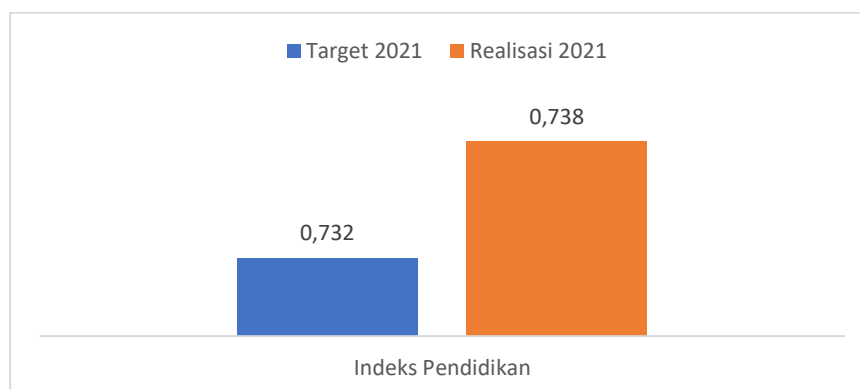
- berupa rehabilitasi, pembangunan ataupun pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah;
- b) Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap guru dan kepala sekolah yang belum memenuhi kompetensi serta melakukan evaluasi terhadap kemungkinan permasalahan yang menjadi penyebabnya. Bagi guru dan kepala sekolah yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diusulkan untuk mengikuti diklat peningkatan kompetensi dan selanjutnya mengikuti ujian kompetensi dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya. Sedangkan untuk guru dan kepala sekolah yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara (Non ASN) akan terus dihimbau dan didorong untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan linearitas dan profesionalitas sebagai Guru dan Kepala Sekolah;
  - c) Bagi lembaga satuan pendidikan yang belum memenuhi standard kualifikasi untuk memperoleh penilaian akreditasi khususnya untuk predikat Amat Baik (A), akan dilakukan monitoring dan evaluasi terkait kondisi dan permasalahan yang mungkin bisa menjadi penyebabnya. Kemudian dilakukan pembinaan, asistensi dan pendampingan untuk lembaga – lembaga tersebut, sehingga dapat meningkatkan manajemen kelembagaan dan standar kualifikasi sehingga pada saat proses penilaian akreditasi selanjutnya lembaga – lembaga tersebut dapat memperoleh nilai yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa memperoleh predikat nilai Amat Baik (A);
  - d) Berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk segera menyelesaikan proses perpindahan data dari aplikasi DIGILIB ke aplikasi INLISLITE;
  - e) Pengadaan sarana prasarana untuk memperbaiki bahan pustaka dan memaksimalkan upaya pemeliharaan bahan pustaka;
  - f) Segera dibuatkan konten baru melalui sosial media sebagai bahan promosi layanan perpustakaan;
  - g) Mengajukan telaah staf kepada Walikota Mojokerto terkait Tim Gerakan Masyarakat Minat Baca;
  - h) Melakukan pembinaan pemuda dan atlet secara intensif yang ada di Kota Mojokerto dalam upaya persiapan even/kejuaraan tingkat nasional maupun internasional serta memfasilitasi dalam pengiriman pemuda dan atlet.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Pendidikan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan



lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Indeks Pendidikan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



**Gambar 2. 3 Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Pendidikan Tahun 2021**

### 2.3.1.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Indeks Kesehatan

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Kesehatan Tahun 2021

**Tabel 2. 12 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kesehatan Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan							
	2.1.1 Indeks Kesehatan	0,821	0,821	0,821	100%	0,820	0,820	100%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kesehatan sebesar 0,821 yang dimana angka tersebut sama dengan target yang ditetapkan yakni 0,821. Angka tersebut mengindikasikan bahwa program-program pelayanan kesehatan di tahun 2021 telah efektif dalam mewujudkan Indeks Kesehatan di tahun 2021. Berikut adalah tabel untuk mendukung tercapainya Indeks Kesehatan sesuai dengan target yang telah ditentukan:



**Tabel 2. 13 Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Kesehatan Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Menguatnya Capaian Derajat Kesehatan dan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Keluarga Sehat	33 %	37,82%	114,61 %
2	Meningkatnya Mutu Layanan, Kemandirian dan Akuntabilitas Rumah Sakit	Cost Recovery Rate (CRR)	94 %	104 %	110,64 %

Sumber : LKjIP DinkesP2KB 2021, LKjIP RSUD 2021

Indikator Presentase Keluarga Sehat telah mencapai hasil yang sangat baik. Dari target kenaikan presentase keluarga sehat sebesar 33 % ternyata dapat tercapai melebihi target yaitu sebanyak 37,82 % artinya bahwa capaiannya 114,61 %. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu target 32 % realisasi 32,72% dan capaian kinerja 102,25%, maka capaian kinerja pada sasaran 1 tahun ini telah mengalami kenaikan sebesar 12,35%.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, diupayakan melalui 12 indikator keluarga sehat yang digunakan sebagai penanda status kesehatan keluarga serta meningkatkan akses pelayanan yang komprehensif dengan hasil pencapaian sebagai berikut :

**Tabel 2. 14 Capaian Indikator Keluarga Sehat Tahun 2021**

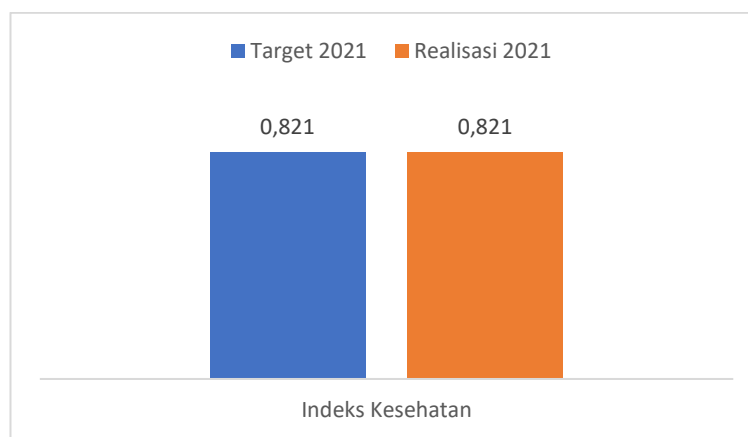
No	Indikator IKS	Capaian
1	Keluarga mengikuti program KB atau keluarga berencana	47%
2	Ibu melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan	87%
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	96%
4	Bayi mendapat air susu (ASI) eksklusif	90%
5	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	94%
6	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	62%
7	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	35%
8	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan Sekeluarga menjadi anggota JKN (jaminan kesehatan nasional) atau asuransi kesehatan	64%
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	59%
10	Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83%
11	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	99%
12	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	97%

Sumber : Dinkes P2KB, 2022



## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Kesehatan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Indeks Kesehatan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 4 Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Kesehatan

### 2.3.1.3 Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Indeks Pengeluaran Per Kapita

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021

Tabel 2. 15 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengeluaran per Kapita Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3.1	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat							
	3.1.1 Indeks Pengeluaran per Kapita	0,794	0,794	0,796	100,25%	0,800	0,793	99,13%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

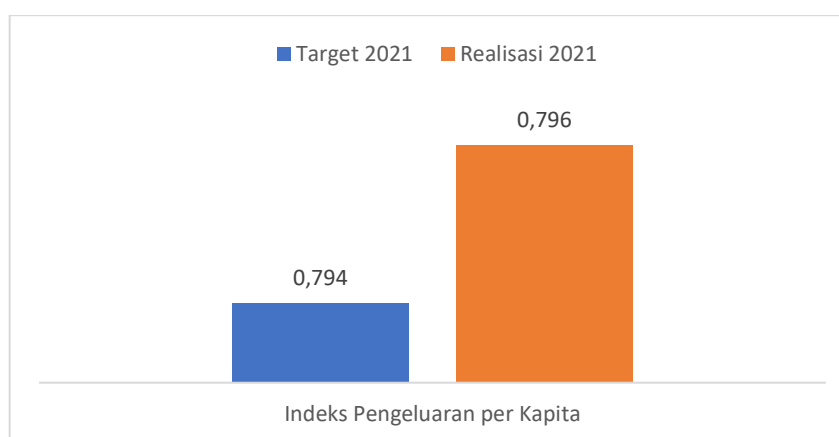
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Pengeluaran per Kapita di tahun 2021 sebesar 0,796 atau telah melampaui target yang ditetapkan sebesar



0,794. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2021 sudah cukup efektif dalam mengendalikan harga komoditi-komoditi barang dan jasa di masyarakat.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Pengeluaran Per Kapita

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Indeks Pengeluaran Per Kapita dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 5 Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Pengeluaran Per Kapita Tahun 2021

### 2.3.1.4 Sasaran Meningkatnya Ketaatan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Presentase Pelanggaran Perda yang terselesaikan

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Presentase Pelanggaran Perda yang Terselesaikan Tahun 2021

Tabel 2. 16 Capaian Kinerja Indikator Menurunnya Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Mojokerto Tahun 2021

Sasaran dan Indikator Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.1 Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah							



Sasaran dan Indikator Sasaran			Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.1.1	Persentase Pelanggaran Perda yang Terselesaikan	88%	88%	100%	113,64%	87,62%	87,62%	100%	

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa capaian indikator sasaran strategis tahun 2021 sebesar 100%, hal ini telah menunjukkan kualitas dari penegakan peraturan daerah dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang ada di Kota Mojokerto sudah cukup baik.

**Tabel 2. 17 Capaian Indikator yang Mendukung Persentase Pelanggaran Perda yang Terselesaikan Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Menurunnya Pelanggaran Hukum/Peraturan/ Norma	Persentase Menurunnya Gangguan Kamtibmas	20%	20%	100%
		Persentase Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perwali	90%	100%	111%
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Respon Time Waktu Tanggap Bencana Kebakaran	< 14 menit	< 14 menit	100%
		Jumlah Kampung Siaga Bencana (Mitigasi Bencana)	3	3	100%

Sumber : LKjIP Satpol PP, 2021

Untuk indikator Persentase Menurunnya Gangguan Kamtibmas realisasi sebesar 20% dari target 20%. Hasil perhitungan tersebut didapat dari pengukuran komponen – komponen Gangguan Kamtibmas. Dengan kata lain, menurunnya realisasi komponen Gangguan Kamtibmas, maka akan menurunkan persentase Gangguan Kamtibmas di Kota Mojokerto.

Target dan realisasi 2021 atas indikator kinerja Persentase Pelanggaran Perda dan Perwali yang terselesaikan dengan Target 90% dan realisasinya 100%. Disini masih terjadi banyak pelanggaran Perda dan Perwali tentang Peraturan Walikota No 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Nornal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 (Penertiban dan Razia Masker) yang berlangsung selama 2 Tahun. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto sebagai Petugas dan Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota setiap hari mengadakan Operasi Yustisi / Razia Masker. Dalam Operasi Yustisi tersebut



masih banyak ditemukan pelanggar walaupun tidak sebanyak Tahun 2020, yang setiap harinya tidak memakai masker sehingga ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.

Respon Time Tingkat Waktu Tanggap Bencana Kebakaran pada tahun 2021 telah sesuai antara realisasi dan targetnya. Karena setiap terjadi kebakaran, para Petugas Kebakaran dengan Siap dan Sigap saat mendapat info terjadi kebakaran di wilayah Kota Mojokerto. Dan ketika para Petugas Pemadam Kebakaran sampai dilokasi dalam waktu < 14 Menit.

Indikator selanjutnya adalah tentang Kampung Siaga Bencana (Mitigasi Bencana). Dalam indikator ini realisasinya sesuai target yaitu target 3 kampung realisasinya 3 kampung yaitu Kampung yang dijadikan sebagai Kampung Siaga Bencana (Kampung Tangguh Semeru) ada 3 Kampung Siaga Bencana yang sudah terbentuk yaitu Rukun Warga 3 Lingkungan Wates Kelurahan Wates Kecamatan Magersari, Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon dan Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan. Dapat disebut KSB jika:

- a) Memiliki kerawanan terhadap jenis bencana tertentu;
- b) Adanya kesiapan dan peran aktif masyarakat.

Dalam pencapaian indikator presentase pelanggaran perda yang terselesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
- b) Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto;
- c) Belum adanya personil Satpol PP bersertifikasi PPNS;
- d) Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Adapun upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

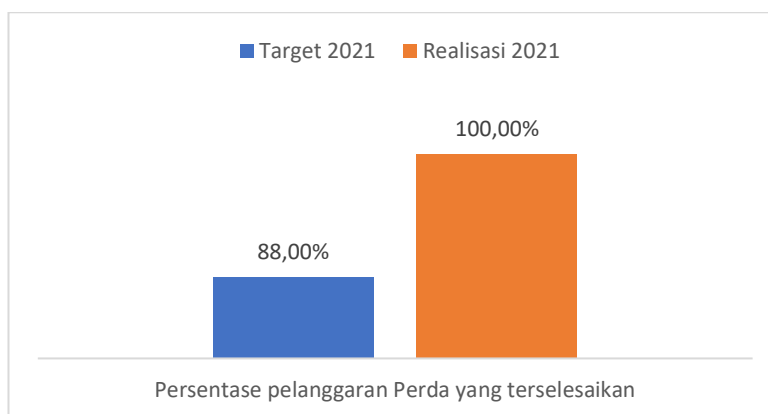
- a) Melakukan upaya sosialisasi dan penegakan terhadap peraturan perundang - undangan terhadap masyarakat dan aparatur;
- b) Mengikutsertakan personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung pelaksanaan tugas;



- d) Mengikutsertakan personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti Diklat PPNS;
- e) Peningkatan sumber daya aparatur anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan mengikut sertakan dalam kegiatan pendidikan dan latihan dasar dan berbagai pelatihan lainnya.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Presentase Pelanggaran Perda yang Terselesaikan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Presentase Pelanggaran Perda yang terselesaikan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 6 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Presentase Pelanggaran Perda yang Terselesaikan Tahun 2021

### 2.3.1.5 Sasaran Terciptanya Kerukunan Sosial di Masyarakat

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan Tahun 2021





**Tabel 2. 18 Capaian Kinerja Indikator Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.1	Terciptanya Kerukunan Sosial di Masyarakat							
	5.1.1 Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100%	100%	92,86%	92,86%	-	-	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Capaian indikator persentase konflik sosial yang terselesaikan ini didukung oleh capaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui indikator utamanya, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2. 19 Indikator Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Persentase Konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan	100%	92,86%	92,86%

Sumber : LKJIP Bakesbangpol, 2021

Realisasi untuk indikator persentase konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan sebesar 92,86% dan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Pada tahun 2021 terjadi 14 kali konflik (unjuk rasa) terkait ekonomi, politik dan sosial. Yang dapat diselesaikan sebanyak 13 kali konflik melalui mediasi antara pihak yang berkonflik difasilitasi oleh Bakesbangpol dan jajarannya.

- a) Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut:
- b) Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Bakesbangpol dalam rangka upaya mediasi dan mencegah adanya demo yang akan dilakukan agar tidak sampai anarkis
- c) Bakesbangpol kedepan akan melakukan komunikasi yang lebih intensif agar terjadi kesepakatan guna mencegah terjadinya demo/ unjuk rasa, sehingga keamanan dan ketertiban wilayah Kota Mojokerto tetap kondusif dan stabilitas politik di daerah tetap terjaga
- d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini serta penanggulangan terhadap potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) dalam rangkaantisipasi terjadinya konflik di masyarakat.



- e) Mengoptimalkan peran forum-forum mitra Bakesbangpol (FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, FKUB) yang telah ada untuk mengantisipasi timbulnya gejala di masyarakat yang dapat mengganggu kondusivitas daerah.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.



**Gambar 2. 7 Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Presentase Konflik Sosial yang Terselesaikan Tahun 2021**

### 2.3.1.6 Sasaran Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Melayani

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Nilai SAKIP

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Nilai SAKIP Tahun 2021

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat



menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada tahun 2017 nilai SAKIP Pemerintah Kota Mojokerto adalah C, kemudian pada tahun 2019 nilainya meningkat menjadi B. Hal ini menandakan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kota Mojokerto sudah semakin baik.

**Tabel 2. 20 Capaian Indikator Nilai SAKIP Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
6.1.1	Nilai SAKIP	BB	BB			BB	B	50%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Untuk nilai SAKIP tahun 2021 belum dapat diketahui dikarenakan hasil penilaian belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021.

Implementasi SAKIP yang baik di tingkat Perangkat Daerah berpengaruh besar terhadap nilai SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendukung target nilai SAKIP Kota yang Sangat Baik (BB), persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai akuntabilitas menjadi Indikator Kinerja Inspektorat dengan target 100% di tahun 2021. Dari 25 Perangkat Daerah yang dinilai, ada 1 Perangkat Daerah yang belum memperoleh nilai akuntabilitas BB, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana tabel berikut ini.

No	Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	85,54	A (Memuaskan)
2	Dinas Perhubungan	85,02	A (Memuaskan)
3	Inspektorat	84,44	A (Memuaskan)
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	81,82	A (Memuaskan)
5	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	81,22	A (Memuaskan)
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,06	A (Memuaskan)
7	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	78,97	BB (Sangat Baik)
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,68	BB (Sangat Baik)
9	RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo	78,31	BB (Sangat Baik)
10	Dinas Komunikasi & Informatika	78,14	BB (Sangat Baik)
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	77,62	BB (Sangat Baik)



No	Perangkat Daerah	Nilai	Keterangan
12	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	77,04	BB (Sangat Baik)
13	Dinas Lingkungan Hidup	76,31	BB (Sangat Baik)
14	Sekretariat DPRD	76,21	BB (Sangat Baik)
15	Kecamatan Kranggan	74,10	BB (Sangat Baik)
16	Kecamatan Prajuritkulon	74,04	BB (Sangat Baik)
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	73,60	BB (Sangat Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	72,28	BB (Sangat Baik)
19	Satuan Polisi Pamong Praja	72,14	BB (Sangat Baik)
20	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	71,10	BB (Sangat Baik)
21	Kecamatan Magersari	70,71	BB (Sangat Baik)
22	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	70,50	BB (Sangat Baik)
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70,31	BB (Sangat Baik)
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	70,04	BB (Sangat Baik)
25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66,39	B (Baik)

Sumber : Inspektorat, 2021

Analisis penyebab pencapaian kinerja yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

- a) Pemahaman Perangkat Daerah terhadap SAKIP baik bukti dukung, maupun pertanyaan saat evaluasi masih kurang;
- b) Atensi pemenuhan SAKIP di level pimpinan masih kurang;
- c) Kurangnya bukti dukung dari Perangkat Daerah;
- d) Sulitnya merubah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang belum konsisten;
- e) Monitoring kinerja belm menjadi budaya.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, antara lain:

- a) Mengkomunikasikan dengan Perangkat Daerah terkait pemenuhan bukti dukung dan maksud dari pertanyaan pada saat evaluasi (melaksanakan asistensi SAKIP);
- b) Pemanfaatan sistem *cloud* untuk mempermudah pengumpulan bukti dukung dari Perangkat Daerah;
- c) Peningkatan pengetahuan APIP terkait Reformasi Birokrasi dengan Narasumber dari Kemenpan RB dengan harapan dapat memberikan pendampingan Reformasi Birokrasi kepada Perangkat Daerah.



## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Nilai SAKIP

Untuk Nilai SAKIP tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Namun jika menggunakan capaian tahun 2020, maka realisasi belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan di RPJMD

### b. Opini BPK

#### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2021

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- a) Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- b) Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- c) Tidak wajar (*adversed opinion*)
- d) Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

**Tabel 2. 21 Capaian Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1 Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
6.1.2 Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

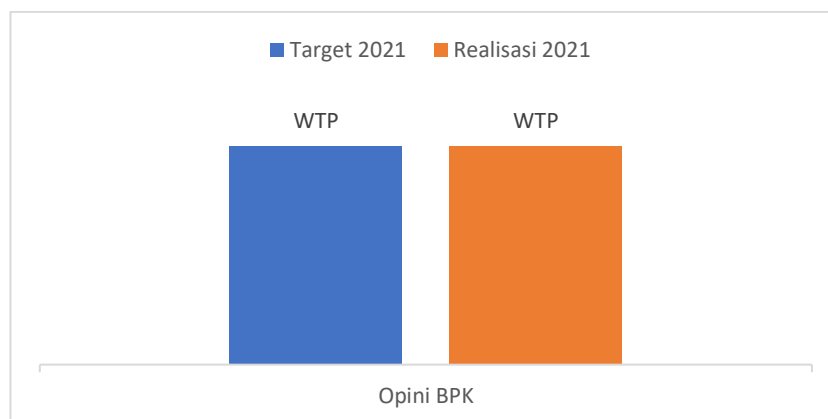
Target dan realisasi tahun 2021 atas indikator opini BPK telah tercapai yakni dengan diraihnya penghargaan kepada Pemerintah Kota Mojokerto atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Opini BPK

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap



indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi Opini BPK dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.



**Gambar 2. 8 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Opini BPK Tahun 2021**

### c. IKM

#### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator IKM Tahun 2021

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara Pelayanan Publik, nilai persepsi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan adalah sebagai mana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 22 Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber : PermenpanRB 14/2017

**Tabel 2. 23 Capaian Kinerja Indikator IKM Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator	Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani								
	6.1.3	IKM	81,26-88,30	81,26-88,30	84,44	100%	84,85	84,35	99,41%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah



Berdasarkan tabel di atas, Indeks Kepuasan Masyarakat capaian kerjanya di tahun 2021 yakni sebesar 84,44 telah memenuhi target kinerja yang diamanatkan yakni sebesar 81,26 s/d 88,30 atau persepsi baik dari masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Mojokerto adalah baik, yang mana dalam hal ini capaian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto terhadap target kinerja telah efektif.

**Tabel 2. 24 Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021**

No	Perangkat Daerah	Nilai SKM
1	Kelurahan Gedongan	97,4
2	Kecamatan Magersari	96,45
3	Kecamatan Kranggan	94,66
4	Kecamatan Prajurit Kulon	90,48
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,32
6	Kelurahan Wates	88,66
7	Kelurahan Pulorejo	88,52
8	Dinas Sosial	87,69
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	87,65
10	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan	87,23
11	Sekretariat DPRD	86,77
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86,72
13	RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo	86,41
14	Satuan Polisi Pamong Praja	86,34
15	Kelurahan Surodinawan	85,81
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,77
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	85,42
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	85,32
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85,27
20	Dinas Perhubungan	84,32
21	Dinas Kesehatan	83,6
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	83,34
23	Bagian Organisasi	83,25
24	Kelurahan Kauman	83,18
25	Kelurahan Kedundung	82,97
26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82,96
27	Inspektorat	82,87
28	Bagian Protokol dan Komunikasi	82,4
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82,09
30	Bagian Umum	82,04
31	Bagian Pemerintahan	81,51
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	80,87
33	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	80,48
34	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	80,38
35	Bagian Hukum	79,63
36	Kelurahan Jagalan	79,57
37	Dinas Lingkungan Hidup	78,79



No	Perangkat Daerah	Nilai SKM
38	Kelurahan Sentanan	78,07
<b>Rata Rata Nilai Kepuasan Masyarakat</b>		<b>84,35</b>

Sumber : Bag. Organisasi Setda, 2021

Untuk Pelayanan Publik yang mengikuti kompetensi Inovasi sebagai berikut :

- a) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, dalam menyusun proposal Inovasi, Perangkat Daerah telah menggunakan aplikasi KIMOJO (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Mojokerto).

No	Judul Inovasi	Nama OPD
1	<b>GAYATRI KENDALI COVID-19</b> (Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi Kendali COVID-19)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	<b>PEWARIS SIASAT</b> (Pelayanan Waris Gratis Siap Setiap Saat)	Kecamatan Magersari
3	<b>MOTOR PANJENENGAN</b> (Motor Pengantar Jenazah Kelurahan Gedongan)	Kelurahan Gedongan
4	<b>PANCEN SUEGER</b> (Pembelajaran Tatap Muka di Pandemi Covid-19 dengan Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun, Sehat dan Gembira)	UPT SMPN 3
5	<b>CEKER PEDAS SEDIKIT MANIS</b> (Cegah Kejadian dan Resiko Komplikasi Penyakit DM dengan Edukasi, Screening Sejak Dini, Obati, Monitor Kondisi serta Perawatan Luka Masa Kini)	Puskesmas Gedongan
6	<b>SI MAPAN</b> (Eks REVANOL Registrasi Via Android Online)	RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo
7	<b>BRANTAS TUNTAS</b> (Berita Anak Terkini di Sekolah Orang Tua Nyaman Tenang dan Puas)	UPT SMPN 5
8	<b>MAGIS</b> (Mojokerto Kota - Geographic Information Sistem)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
9	<b>CURHAT NING ITA.....</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	<b>KERAPU ENAK</b> (Kerjasama Pemanfaatan Kartu Identitas Anak)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : Bag. Organisasi Setda, 2021

Setelah dilakukan penilaian, maka diperoleh pemenang sebagai berikut:

Pemenang 1 :	GAYATRI KENDALI COVID-19	Rp. 3.000.000
Pemenang 2 :	PEWARIS SIASAT	Rp. 2.500.000
Pemenang 3 :	MOTOR PANJENENGAN	Rp. 2.000.000





b) SINOVIK (Sistem Inovasi Pelayanan Publik) yaitu Kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan Lomba Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional.

Tahun 2021 dari 11 (sebelas) proposal inovasi yang disampaikan ke Kementerian PAN RB, maka yang masuk nominasi finalis adalah Gayatri Kendali Covid-19 (Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi Kendali Covid-19).

c) KOVABLIK Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Untuk inovasi tingkat Provinsi Jawa Timur ini, Pemerintah Kota Mojokerto mengirimkan 6 (enam) proposal inovasi dan belum masuk nominasi dan hanya lolos administrasi.

Anggaran yang digunakan dalam mendukung kegiatan Pelayanan Publik sebesar total Rp. 334.470.910,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 276.572.023,- atau anggaran yang terserap untuk kegiatan pelayanan publik yaitu 82,69 %.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi IKM

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada IKM dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



Gambar 2. 9 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi IKM



**d. Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM**

**1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM Tahun 2021**

Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah pada hakikatnya mengamankan pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintahan. Secara substantif proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu penancangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Salah satu komponen utama yang menjadi acuan efektif tidaknya pembangunan zona integritas adalah predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Terkait WBK dan WBBM berikut merupakan acuan standarisasi yang digunakan sebagai syarat pengajuan predikat WBK dan WBBM:

**Tabel 2. 25 Acuan Standarisasi Predikat WBK dan WBBM**

No	Jenis Predikat	Syarat
1.	WBK	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan; dan</li> <li>Mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (AKIP) minimal "CC".</li> </ol>
2.	WBBM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas opini laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut; dan</li> <li>Mendapatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah (AKIP) minimal "CC".</li> </ol>

Sumber : Permenpan 52/2014



**Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Indikator Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
	6.1.4 Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	2	2	2	100%	1	0	0%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Target unit kerja yang mendapatkan predikat WBK pada tahun 2021 adalah 2 unit kerja. Pada tahun 2021 ada 6 Perangkat Daerah yang diusulkan untuk memperoleh WBK, yaitu :

- a) Dinas Perhubungan;
- b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- d) RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo;
- e) Kecamatan Prajuritkulon;
- f) UPT Puskesmas Gedongan.

Pada tahun 2021, unit kerja yang diajukan untuk penilaian WBK oleh Menpan RB, yang telah memenuhi kriteria sebanyak 2 (dua) unit kerja yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo. Dari target kinerja sebanyak 1 (satu) unit kerja dan telah terealisasi 2 unit kerja, maka capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100% atau dalam kriteria sangat baik. Sedangkan untuk predikat WBBM, Kota Mojokerto belum mendapatkan predikat tersebut karena belum memenuhi kriteria ketika dilakukan penilaian oleh Kemenpan RB.

## **2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM**

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi



Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



**Gambar 2. 10 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Jumlah Unit yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM Tahun 2021**

#### e. Indeks SPBE

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE Tahun 2021

Berbicara masalah SPBE tidak hanya membahas tentang aplikasi atau software saja, tetapi dibutuhkan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, pengendalian dalam penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu yang menjadi unsur-unsur penilaian capaian Indeks SPBE oleh Kemenpan RB :

Unsur-unsur SPBE ini meliputi :

- a) Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE;
- b) Perencanaan Strategis SPBE;
- c) Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d) Penyelenggara SPBE;
- e) Penerapan Manajemen SPBE;
- f) Audit TIK;
- g) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- h) Layanan Publik Berbasis Elektronik.

**Tabel 2. 27 Capaian Kinerja Indikator Indeks SPBE Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1 Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							



Sasaran dan Indikator Sasaran			Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1.4	Indeks SPBE		3,30	3,30	2,92	88,48%	2,26	3,22	143%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

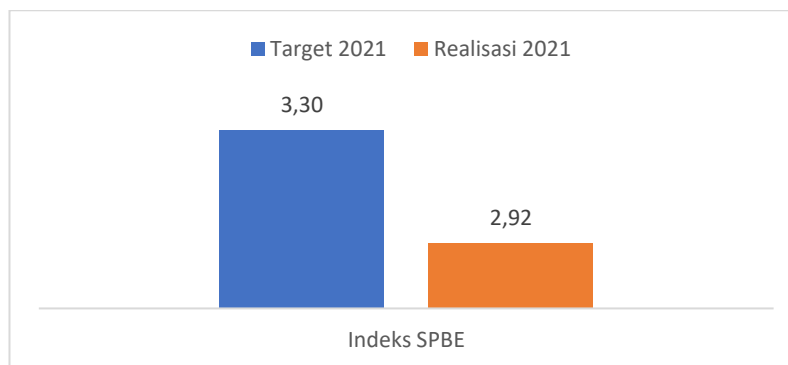
Realisasi capaian Indeks SPBE Tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 2,92, masih termasuk **kategori baik** sesuai dengan SK Menpan dan RB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Menurunnya angka capaian realisasi Indeks SPBE Tahun 2021 dikarenakan banyak faktor. Dibutuhkan kerjasama antar Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Disamping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme ASN dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks SPBE

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi Indeks SPBE dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



**Gambar 2. 11 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2021**

**f. Indeks Manajemen Resiko**

**1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Manajemen Resiko Tahun 2021**

**Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Indikator Indeks Manajemen Resiko Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
	6.1.5 Indeks Manajemen Resiko	1	1	2,711	271,1%	-	-	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,158, skor Manajemen Resiko Indeks (MRI) sebesar **2,711**, dan skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,921, dengan rincian penilaian sebagai berikut :



**Tabel 2. 29 Komponen Penilaian MRI**

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	1,400
2.	Struktur dan Proses	30%	0,798
3.	Pencapaian Tujuan	30%	0,960
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,158
	<b>Nilai Manajemen Resiko Indeks</b>		<b>2,711</b>
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,921

Sumber : BPKP Prov. Jatim 2021

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Manajemen Resiko

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi Indeks Manajemen Resiko dapat dilihat berdasarkan grafik berikut



**Gambar 2. 12 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks Manajemen Resiko Tahun 2021**

## g. Sistem Merit

### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sistem Merit Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, manajemen PNS diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis



kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit tersebut diselenggarakan pada seluruh aspek manajemen PNS, yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan Pegawai Negeri Sipil.

**Tabel 2. 30 Capaian Kinerja Indikator Sistem Merit Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
	6.1.6 Sistem Merit	175-249 (Kurang)	175-249 (Kurang)	288 (Baik)	115,66%	163 (Buruk)	163 (Buruk)	Sistem Merit

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Pada tahun 2021 penetapan target untuk penerapan sistem merit adalah dengan sebesar 175-249 yang merupakan kategori kurang. Dan untuk realisasi di Tahun 2021 adalah sebesar 288 yang merupakan kategori baik sehingga terdapat pencapaian sebesar 115,66%.

Penilaian mandiri penerapan system merit tersebut dilakukan baik melalui kuisioner (manual) dan melalui aplikasi SIPINTER. Berdasarkan jumlah pemetaan penilaian penerapan sistem merit, dari 27 Pemerintah Kota dan 76 Pemerintah Kabupaten, hanya terdapat 18 Pemerintah Kabupaten dan 5 Pemerintah Kota yang telah melakukan penilaian penerapan sistem merit melalui aplikasi SIPINTER. Selain itu melakukan penilaian mandiri melalui kuisioner oleh masing-masing pemerintah Kabupaten Kota. Hasil ini akan menjadi dasar KASN untuk menindaklanjuti dan menyusun strategi dalam upaya meningkatkan penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2020. Data tersebut, menunjukkan bahwa rendahnya penerapan sistem merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. 83,5% Pemerintah Kabupaten/Kota menerapkan sistem merit dengan kategori Kurang dan Buruk.

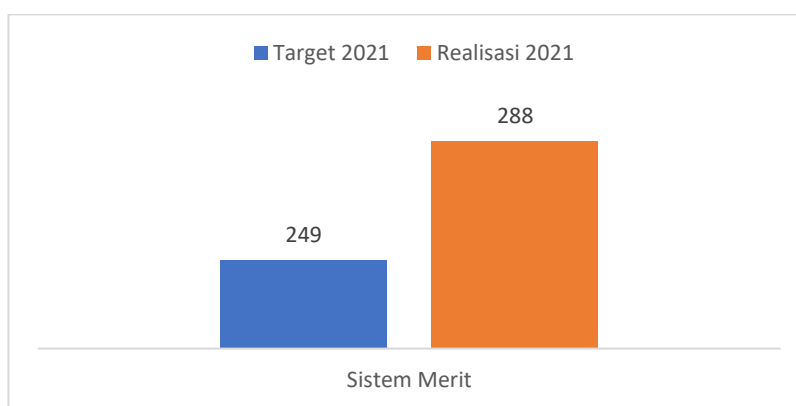
Pencapaian indeks penerapan sistem merit di Kota Mojokerto melebihi target yang telah ditetapkan adalah karena telah dilakukan pemenuhan bukti pendukung atas penilaian penerapan sistem merit melalui aplikasi SIPINTER.





## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Sistem Merit

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Realisasi Sistem Merit dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.



**Gambar 2. 13 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Sistem Merit Tahun 2021**

### 2.3.1.7 Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor-sektor Unggulan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Tahun 2021

Dalam berbagai literatur hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi “investasi” dapat berarti “penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*) yang disebut dengan penanaman modal dalam negeri, investor asing (*foreign direct investment/ FDI*) yang disebut penanaman modal asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment/ FII*). Untuk FII dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio, yakni pembelian efek lewat Lembaga



Pasar Modal (*Capital Market*).<sup>1</sup> Tabel berikut ini memaparkan mengenai realisasi penanaman modal di Kota Mojokerto:

**Tabel 2. 31 Capaian Kinerja Indikator Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.1	Meningkatkannya Pertumbuhan PDRB Sektor-Sektor Unggulan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi							
7.1.1	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	360,000,000,000	360,000,000,000	340,452,087,000	94,57%	381,145,000,000	352,530,000,000	92,49%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Dari tabel diatas terlihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 nilai investasi mengalami kenaikan sebesar 2,08%, meskipun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan masih adanya pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) yang berujung dengan melemahnya nilai investasi dan berimplikasi pada pengurangan jumlah produksi perusahaan yang mungkin juga berakibat terhentinya usaha dari beberapa perusahaan yang ada di kota Mojokerto. Selain itu dengan adanya pembatasan atau *lockdown* membuat aktivitas bisnis terhambat dan membuat kerugian yang tidak sedikit.

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator nilai realisasi investasi antara lain sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pelayanan perizinan, baik secara kualitas (sarana prasarana) maupun kuantitas (waktu pelayanan);
- b) Melakukan pendampingan pengisian OSS, pemenuhan komitmen dan pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
- c) Membuat terobosan/inovasi penanaman modal guna menarik minat investor untuk melakukan investasi di Kota Mojokerto;
- d) Melakukan perbaikan basedata perizinan maupun penanaman modal sebagai dasar penyusunan perencanaan terkait perizinan dan penanaman modal yang lebih akurat.

<sup>1</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.



## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.



**Gambar 2. 14 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) Tahun 2021**

### b. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

#### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2021

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai pertumbuhan PDRB sektor industri di Kota Mojokerto.



**Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2021**

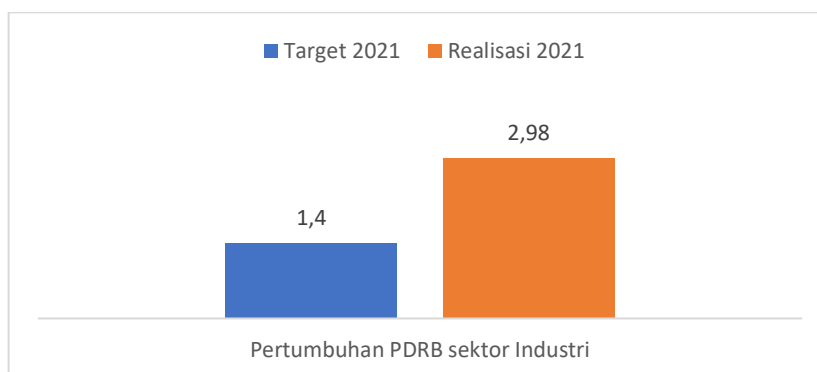
Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.1	Meningkatkannya Pertumbuhan PDRB Sektor-Sektor Unggulan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi							
	7.1.2	Pertumbuhan PDRB sektor Industri	0,7-1,4	0,7-1,4	2,98		5,7 - 6,1	-3,55

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan target Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah 0,7 sampai 1,4, sedangkan realisasinya adalah 2,98. Sehingga Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri telah tercapai dan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada PDRB Sektor Industri dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



**Gambar 2. 15 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2021**



**c. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

**1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2021**

Kategori ini mencakup PDRB pada sub kategori perdagangan. Yang mana pengukuran capaian kinerja indikator pertumbuhan PDRB sektor perdagangan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

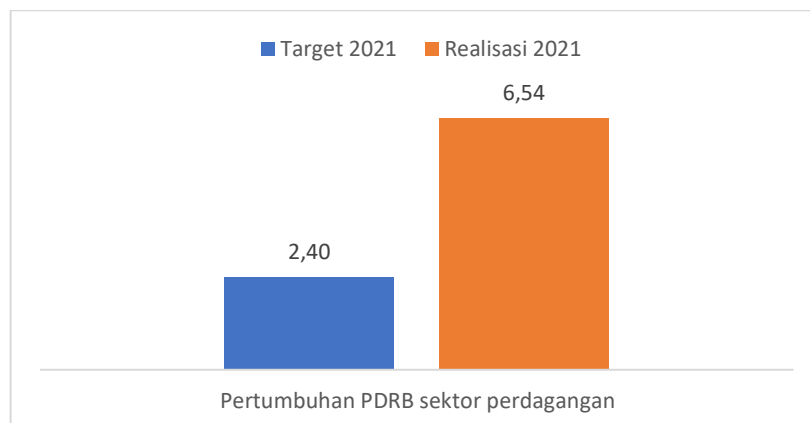
Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.1	Meningkatkannya Pertumbuhan PDRB Sektor-Sektor Unggulan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi							
	7.1.3 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	1,5-2,4	1,5-2,4	6,54		5,8-6,5	-9,20	

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan target Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah 1,5 sampai 2,4, sedangkan realisasinya adalah 6,54. Sehingga Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan telah tercapai dan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020.

**2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan**

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada PDRB sektor perdagangan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



**Gambar 2. 16 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2021**

**d. Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya**

**1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya Tahun 2021**

Pada bagian ini dipaparkan data mengenai pertumbuhan PDRB Kota Mojokerto pada berbagai sektor pendukung selain yang dipaparkan sebelumnya.

**Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator	Sasaran	Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.1	Meningkatkannya Pertumbuhan PDRB Sektor-Sektor Unggulan Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi							
	7.1.4	Pertumbuhan PDRB sektor Lainnya	1,6-2,5	1,6-2,5	2,53	5,3 – 5,4	-0,27	

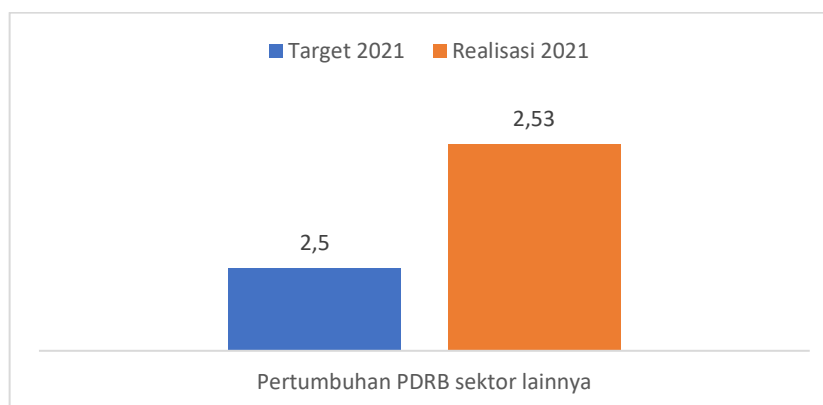
Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan target Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah 1,6 sampai 2,5, sedangkan realisasinya adalah 2,53. Sehingga Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya telah tercapai dan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020.



## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Indikator PDRB sektor lainnya dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



**Gambar 2. 17 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Lainnya Tahun 2021**

### 2.3.1.8 Sasaran Meningkatnya Industri Pariwisata

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2021

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kedatangan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata tentu dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat. Seperti halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah. Berikut ini merupakan pertumbuhan PDRB pada sektor pariwisata di Kota Mojokerto:



**Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.1	Meningkatkan Industri Pariwisata							
	8.1.1	Pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata	1,5	1,5	1,45	96,67%	1	-8,16

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan target Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah 1,5, sedangkan realisasinya adalah 1,45. Sehingga Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata belum tercapai, akan tetapi mengalami kenaikan apabila dibandingkan Tahun 2020.

**Tabel 2. 36 Capaian Indikator yang Mendukung Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Tahun			
		2019	2020	2021	
3.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan				
	3.1	Jumlah Kunjungan Wisata	259.665 orang	500.993 orang	1.325.634 orang
	3.2	Lama Kunjungan Wisata	2 hari	1 hari	2 hari

Sumber : LKJIP Diporapar, 2021

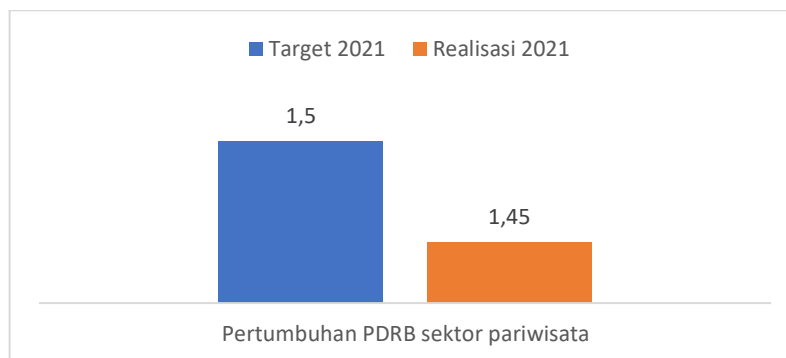
Realisasi kinerja indikator jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2021 sebesar 1.325.634 wisatawan melampaui target indikator sasaran yang ada di rencana strategis yaitu 960.000 orang.

Indikator kinerja utama lama kunjungan wisatawan diperoleh rata-rata lama kunjungan wisatawan ke Kota Mojokerto dengan perhitungan rata-rata lama menginap wisatawan ke hotel. Pada Tahun 2021 realisasi hasil yaitu 2 hari dihitung dari rata-rata lama menginap wisatawan di 12 hotel yang ada di Kota Mojokerto.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada PDRB sektor pariwisata dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.





**Gambar 2. 18 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2021**

### 2.3.1.9 Sasaran Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Laju Inflasi

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Laju Inflasi Tahun 2021

Laju inflasi dalam arti sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya merugikan golongan masyarakat akan tetapi juga berdampak negatif bagi produsen dan pengusaha lainnya, prospek penanaman modal/investasi diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi. Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun nasional. Pada bagian ini dipaparkan data mengenai pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Indikator Laju Inflasi Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
9.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi							
	9.1.1	Laju Inflasi	1,9-2,1	1,9-2,1	1,64	2,5-4,5	1,93	

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

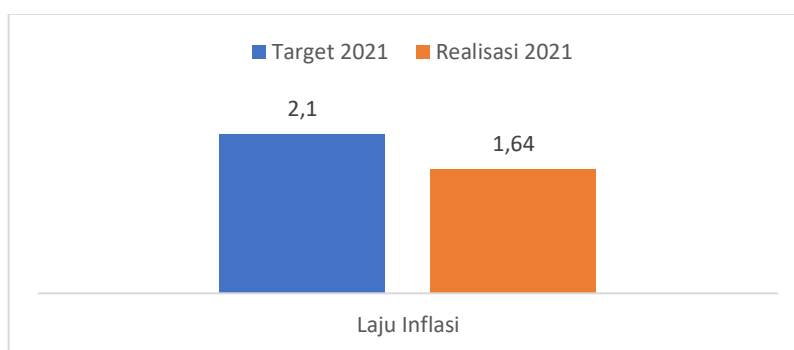
Data tersebut menunjukkan realisasi pada indikator laju inflasi sebesar



1,64, yang artinya masih berada di bawah target RPJMD yaitu 1,9 sampai 2,1. Laju inflasi tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Laju Inflasi

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Indikator laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



Gambar 2. 19 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Laju Inflasi Tahun 2021

### 2.3.1.10 Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum pada hakikatnya merupakan tolak ukur sebuah kondisi dimana infrastruktur fisik yang ada mampu mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Untuk dapat mengetahui nilai indeks dari infrastruktur pekerjaan umum, maka dalam hal ini infrastruktur pekerjaan umum dinilai dari dua aspek infrastruktur, yakni efektivitas infrastruktur jalan dan infrastruktur sumber daya air yang mampu menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Kota Mojokerto.



Terkait hal tersebut, berikut indeks infrastruktur pekerjaan umum Kota Mojokerto di tahun 2021:

**Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan							
	1.1.1 Indeks Pendidikan	0,732	0,732	0,738	100,82%	0,730	0,731	100,14%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum di tahun 2021 sebesar 89,36%, yang mana hal tersebut telah memenuhi target capaian kinerja yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja sebesar 87,56%. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi, infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur jalan dan infrastruktur sumber daya air di tahun 2021 telah efektif dan mampu menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Kota Mojokerto.

Capaian indeks infrastruktur pekerjaan umum ini didukung oleh capaian dinas Pekerjaan Umum, melalui tiga indikator utamanya, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2. 39 Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur yang Andal dan Memadai.	1. Rasio panjang jalan dalam kondisi mantap (>40km/jam)	91,50%	95,98%	104,89%
		2. Persentase luas wilayah bebas genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam)	83,06%	83,20%	100,20 %
		3. Persentase fasilitas publik dalam kondisi baik.	86,67%	88,89%	102,56%

Sumber : LKJIP DPUPRPerakim, 2021

Capaian kinerja Prosentase jalan kota dalam kondisi mantap (>40 Km/Jam) tahun 2021 dari total jalan sepanjang 185.359 Km yang berada dalam kondisi baik dan mantap sepanjang 178.359 Km Realisasi Kinerjanya adalah sebesar 95,98%, capaian dinilai berhasil karena telah melebihi target Indikator Kegiatan yaitu sebesar 91,50%.



$$\begin{aligned} & \text{Persentase jalan kota dalam kondisi mantap } \left( > \frac{40\text{km}}{\text{jam}} \right) \\ &= \frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik+sedang}}{\text{Panjang Jalan Sekota}} \times 100\% \\ &= \frac{178.359}{185.825} \times 100\% \\ &= 95,98 \% \end{aligned}$$

Capaian kinerja Persentase luas wilayah bebas genangan (genangan tidak lebih dari 2 jam) dari total Luas Wilayah bebas Genangan <2jam sebesar yang 1.741,19 Km dengan luas wilayah sekota Mojokerto adalah 2.021 Km sehingga Km Realisasi Kinerjanya adalah sebesar 83,20 %, capaian dinilai berhasil karena telah melebihi target Indikator Kegiatan yaitu sebesar 83,06%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase luas wilayah bebas genangan ( genangan tidak lebih dari 2 jam)} \\ &= \frac{\text{Luas Wilayah bebas Genangan } <2\text{ jam}}{\text{Luas Wilayah se kota}} \times 100\% \\ &= \frac{1.741,19}{2.021} \times 100\% \\ &= 83,20 \% \end{aligned}$$

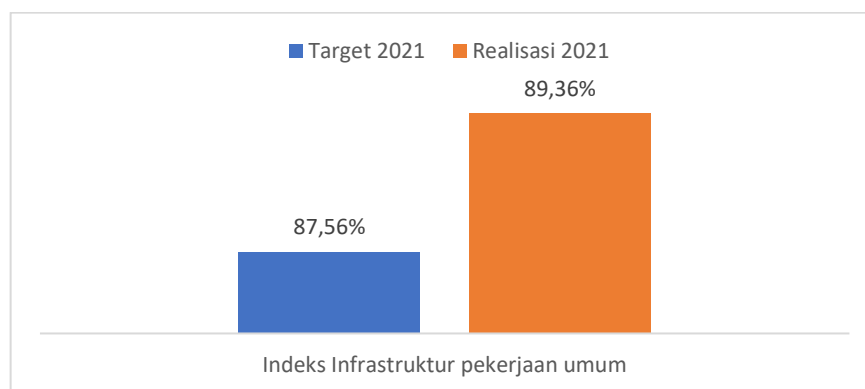
Capaian kinerja Persentase Fasilitas Publik Dalam Kondisi Baik dari total Jumlah seluruh bangunan publik sebanyak 63 dengan Jumlah Bangunan Publik yang memadai adalah 56 sehingga Realisasi Kinerjanya adalah sebesar 88,89 %, capaian dinilai berhasil karena telah melebihi target Indikator Kegiatan yaitu sebesar 86,67%.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Fasilitas publik dalam kondisi baik} \\ &= \frac{\text{Jumlah Bangunan Publik yang memadai}}{\text{Jumlah seluruh bangunan publik}} \times 100\% \\ &= \frac{56}{63} \times 100\% \\ &= 88,89 \% \end{aligned}$$



## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada indikator indeks infrastruktur pekerjaan umum dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



**Gambar 2. 20 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021**

### 2.3.1.11 Sasaran Meningkatnya Akses Penduduk Terhadap Air Minum dan Sanitasi Layak

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman Tahun 2021

Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman pada hakikatnya merupakan tolak ukur sebuah kondisi dimana infrastruktur fisik yang ada mampu mendukung kebutuhan masyarakat atas permukiman yang layak huni. Untuk dapat mengetahui nilai indeks dari Indeks infrastruktur dasar permukiman, maka dalam hal ini infrastruktur dasar permukiman dinilai dari dua aspek infrastruktur, yakni efektivitas sarana prasarana dasar permukiman serta ketersediaan perumahan yang berkualitas dan inklusif yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat Kota Mojokerto atas permukiman yang layak huni.



Terkait hal tersebut, berikut indeks infrastruktur dasar permukiman Kota Mojokerto di tahun 2021:

**Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
11.1	Meningkatnya Akses Penduduk Terhadap Air Minum Dan Sanitasi Layak							
	11.1.1 Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman	96,46%	96,46%	96,70%	100,25%	81%	95,96%	108,47%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Untuk capaian indikator yang mendukung Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 41 Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak	1. Persentase pemenuhan akses layak air minum	95,28%	94,76%	99,45%
		2. Persentase pemenuhan akses layak sanitasi	98,57%	98,63%	100,06%

Sumber : LKjIP DPUPRPerakim, 2021

Capaian kinerja Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum digambarkan dengan jumlah sambungan rumah yang memiliki akses air minum baik melalui PDAM maupun Non PDAM. Pada tahun 2021 target kinerja Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum adalah 95,28%. Dari data masyarakat sebanyak 42.500 SR (Sambungan Rumah) yang memiliki akses layak air minum baik PDAM maupun Non PDAM pada tahun 2021 bertambah 75 SR (sambungan rumah) dari capaian tahun 2020 menjadi 40.271 SR (Sambungan Rumah) atau 94,76%. Capaian pada tahun 2021 dinilai kurang berhasil karena dibawah target kinerja, sehingga perlu adanya inovasi agar dapat mencapai target.



Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah SR Akses Layak Air Minum}}{\text{Jumlah seluruh SR}} \times 100\% \\ &= \frac{40.271}{42.500} \times 100\% \\ &= 94,76 \% \end{aligned}$$

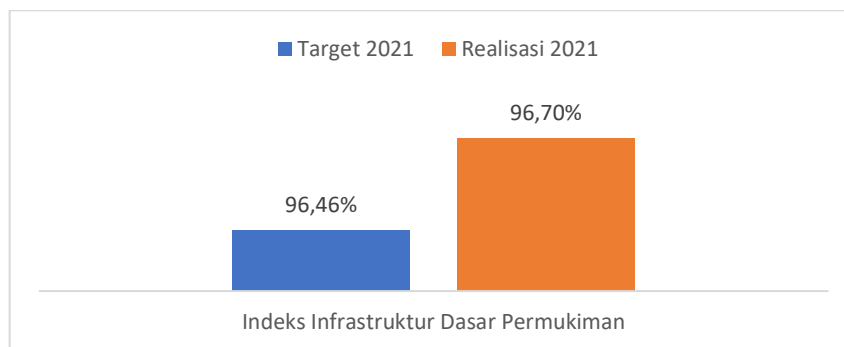
Capaian kinerja Persentase Pemenuhan Akses Layak Sanitasi digambarkan dengan jumlah sambungan rumah yang memiliki Akses Layak Sanitasi melalui IPAL Komunal, Septic Komunal, dan Jamban Individu. Pada tahun 2021 target kinerja Persentase Akses Layak Sanitasi adalah 98,57%. Dari data masyarakat sebanyak 42.500 SR (Sambungan Rumah) yang memiliki Akses Layak Sanitasi Akses Layak Sanitasi pada tahun 2021 bertambah 550 SR (sambungan rumah) dari capaian tahun 2020 menjadi 41.369 SR (Sambungan Rumah) atau 98,65%. Capaian pada tahun 2021 dinilai kurang berhasil karena dibawah target kinerja, sehingga perlu adanya inovasi agar dapat mencapai target.

Persentase Pemenuhan Akses Layak Air Minum

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah SR Akses Layak Sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh SR}} \times 100\% \\ &= \frac{41.369}{42.500} \times 100\% \\ &= 98,65 \% \end{aligned}$$

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada indeks infrastruktur permukiman dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



**Gambar 2. 21 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman Tahun 2021**

### 2.3.1.12 Sasaran Meningkatkan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2021

Terkait hal tersebut, berikut indeks infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan Kota Mojokerto di tahun 2021:

**Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
12.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan							
	12.1.1 Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	92,10	92,10	94,20	102,28%	76,99	91,60	118,98%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tahun 2021 yakni sebesar 94,20, yang mana hal tersebut telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yakni sebesar 92,10. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas dan inklusif di tahun 2021 telah efektif dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat atas kualitas





pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Berikut ini data perhitungan dari Dinas Perhubungan :

**Tabel 2. 43 Komponen Indeks Infrastruktur LLAJ**

No	Komponen Perhitungan	Realisasi	Bobot	Indeks
1	Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	95,09%	60%	55,89
2	Persentase tingkat layanan jalan minimal "C" pada jam sibuk	92,86%	40%	37,14
<b>Indeks Infrastruktur LLAJ</b>				<b>94,20</b>

Sumber : Dishub, 2021

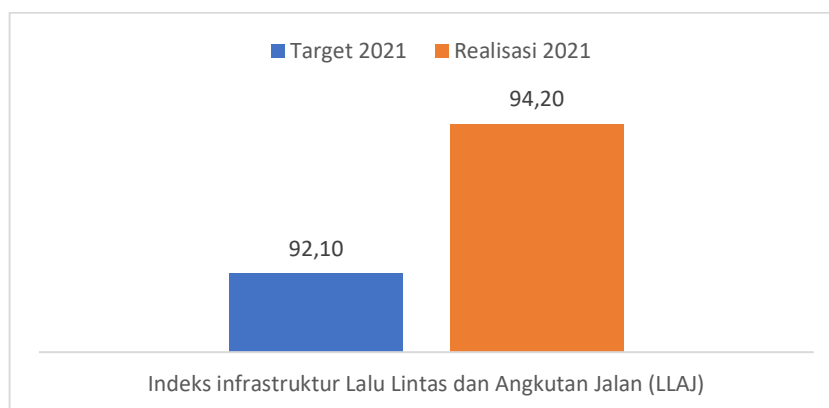
Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebagai berikut:

- a) Banyaknya ruas jalan dengan tingkat layanan jalan "C" pada jam sibuk. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh manajemen dan rekayasa lalu lintas. Selain itu koordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Pekerjaan Umum) yang dilakukan secara rutin dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan (Forum LLAJ) dengan pembahasan tentang permasalahan terkait kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Mojokerto, sehingga kebijakan terkait lalu lintas dan angkutan jalan bisa diputuskan dengan cepat dan tepat sasaran.
- b) Banyaknya fasilitas perlengkapan jalan yang dipasang pada Tahun 2021 diantaranya 34 unit rambu-rambu lalu lintas, 2 unit alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) berupa warning light dan 1 unit ATCS serta 26 unit cermin tikungan. Selain itu pemeliharaan terhadap unit fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang juga dilakukan sehingga kuantitas dan kualitas infrastruktur LLAJ mencapai target yang diharapkan.
- c) Dukungan Walikota Mojokerto terhadap infrastruktur LLAJ juga menjadi faktor penentu tercapainya target indeks infrastruktur LLAJ Tahun 2021. Indeks infrastruktur LLAJ merupakan salah satu indikator sasaran walikota Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023, pada misi ke-4 "Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah", Tujuan ke-5 "Menyediakan Infrastruktur yang Mendukung Pembangunan Ekonomi dengan Memperhatikan Lingkungan Hidup", dan sasaran ke-10 "Meningkatkan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)".



## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada indeks infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



**Gambar 2. 22 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2021**

### 2.3.1.13 Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Tahun 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dapat diinterpretasikan melalui suatu nilai indeks. Indeks atau indicator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi, sehingga menjadi bentuk yang paling mudah untuk dipahami esensinya. IKLHD merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. Nilai IKLHD digunakan untuk memperbaiki kualitas/mutu lingkungan hidup tiap kabupaten/kota pada waktu tertentu. Perhitungan IKLHD dengan rumus :

$$\text{IKLHD} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$



**Tabel 2. 44 Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Nilai IKLH	Kategori
Sangat Baik	90 – 100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 – 24,9

Tabel berikut ini merupakan pemaparan capaian kinerja pada indeks IKLHD Kota Mojokerto:

**Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
13.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup							
	13.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	57,79	57,79	58,08	105,5%	66,45	57,72	86,86%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Dari Hasil perhitungan tersebut, maka IKLH Kota Mojokerto tahun 2021 berada pada posisi **SEDANG** karena angka IKLH yang diperoleh berada pada rentang 50-69,9 yaitu sebesar 58,08.

**Tabel 2. 46 Capaian Indikator yang Mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Meningkatnya Lingkungan Perkotaan yang Bersih, Sehat dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	57,79	58,08	100,50%
		Indeks Kualitas Air	50,06	51	101,88%
		Indeks Kualitas Udara	81,55	81,38	99,79%
		Indeks Kualitas Lahan	27,13	27,16	100,11%
		Persentase sampah yang dikelola	97,45%	97,51%	100,06%

Sumber: LKjIP DLH 2021



Perhitungan indeks untuk Indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran. Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (KLH RI, hal 7, 2013). Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dimana pedoman ini juga mengatur tata cara perhitungan IPA. Kinerja pemantauan kualitas air melalui pemantauan kualitas air pada air limbah industri (inlet dan outlet) dilakukan pada 20 (dua puluh) titik lokasi industri dan pemantauan tersebut dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pada musim penghujan (Bulan April) dan musim kemarau (Bulan Juli) dengan memperhitungkan 20 konsentrasi parameter yaitu Ph, DO, BOD, COD, TDS, TSS, NH<sub>3</sub>-N, NO<sub>3</sub>-N, T-P, Fecal Coliform, SUhu, Total Coliform, Minyak Lemak, Deterjen, Fenol, CO, NO, Zn, Hg, Fe. untuk mengetahui kondisi kualitas air limbah industri di wilayah Kota Mojokerto.

Dari hasil perhitungan tersebut didapat angka 51 (SEDANG) dari target 50,06 atau dengan kata lain prosentase capaiannya sebesar 101,88%.

Berdasarkan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2021 adalah sebesar 81,55 dan tercapai sebesar 81,38 (Baik). Indeks Kualitas Udara (IKU) tidak mencapai target dikarenakan pertumbuhan kendaraan semakin meningkat dan konsumsi energi yang menyebabkan kadar emisi mengalami peningkatan juga.

Dari hasil perhitungan tersebut didapat IKL Kota Mojokerto sebesar 27,16 dari target sebesar 27,13 atau prosentase capaian sebesar 100,11%. Kondisi Tutupan Hutan di Kota Mojokerto berdasarkan indkes kualitas lahan termasuk kategori WASPADA.

Pada tahun 2021, prosentase pengelolaan sampah sudah mencapai target yaitu sebesar 97,51% dari target 97,45% atau prosentase capaian kinerja sebesar 100,06%.

## **2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)**

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan



lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:



**Gambar 2. 23 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Tahun 2021**

#### 2.3.1.14 Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya Lokal

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

##### a. Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya Tahun 2021

Kelompok Seni Budaya yang Aktif merupakan kelompok seniman budaya yang masih aktif dan berdomisili di Kota Mojokerto. Indikator kinerja utama jumlah seni budaya yang aktif diperoleh dari menghitung jumlah grup seni budaya yang aktif dimana grup seni tersebut telah mengurus kartu induk kesenian.

**Tabel 2. 47 Capaian Indikator Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
14.1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya Lokal							
	14.1.1 Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya	6	6	12	200 %	13	0	0%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah



Indikator Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya pada Tahun 2021 terealisasi sebanyak 12 (dua belas), melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 (enam). Untuk mencapai target tersebut, didukung oleh capaian indikator pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 48 Capaian Indikator yang Mendukung Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Lestarnya Seni Budaya dan Cagar Budaya	Jumlah Seni Budaya yang Aktif	55 group	55 group	100%
		Jumlah Cagar Budaya yang Lestari	12 unit	12 unit	100%

Sumber: LKJIP Disdikbud, 2021

Jumlah seni budaya yang aktif berdasarkan data kelompok seni dan budaya yang telah terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sesuai dengan Kartu Induk Kesenian yang telah di terbitkan. Untuk tahun 2021 di targetkan ada 55 kelompok seni dan budaya yang aktif dengan realisasi 55 kelompok seni dan budaya yang aktif. Evaluasi dan Monitoring lembaga seni dan budaya di lakukan minimal satu bulan sekali dan maksimal tidak terbatas dan akan di lakukan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk memvalidasi data lembaga seni dan budaya agar sesuai dengan data yang di miliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

Untuk indikator kinerja jumlah cagar budaya yang lestari, Perpres nomor 65 Tahun 2018 telah muncul Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang di maksud memajukan kebudayaan ada 3 hal yaitu :

1. Penataan dan pendataan potensi budaya;
2. Bagaimana perawatan dan pemeliharaan terhadap potensi daerah;
3. Bagaimana upaya pelestarian dan pemanfaatan terhadap potensi budaya.

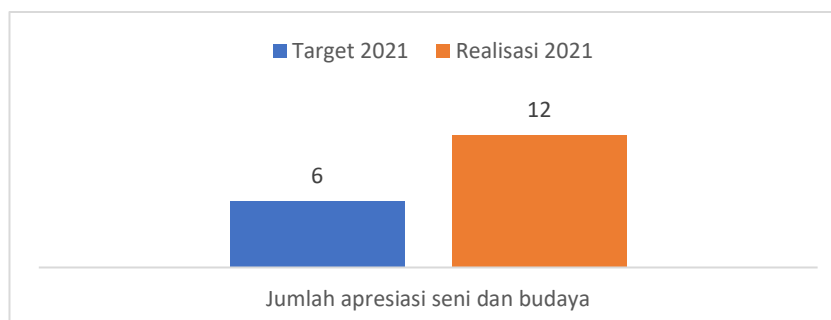
Untuk tahun 2021 ini target jumlah cagar budaya yang lestari ada 12 cagar budaya dan realisasinya 12 cagar budaya.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan



lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Kelompok Seni Budaya Yang Aktif dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



**Gambar 2. 24 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Jumlah Apresiasi Seni dan Budaya Tahun 2021**

### 2.3.1.15 Sasaran Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Persentase Konflik SARA yang terselesaikan

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan Tahun 2021

**Tabel 2. 49 Capaian Indikator Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
15.1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama							
	15.1.1 Persentase konflik SARA yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	-	-	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2021 tidak terdapat satu pun kasus konflik SARA yang mana hal tersebut telah memenuhi target perjanjian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto telah berhasil menciptakan kerukunan antar umat beragama di masyarakat.

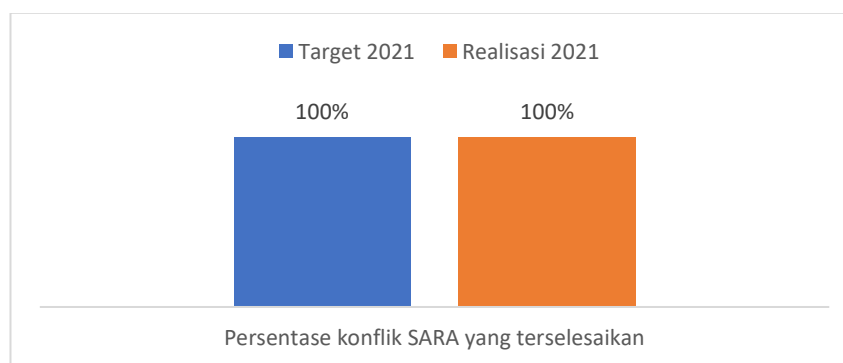


Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi konflik sara tersebut yaitu :

1. Pemberian sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama kepada seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan;
2. Pembinaan yang dilakukan oleh FKUB pada 18 Kelurahan;
3. Pembinaan yang dilakukan oleh FPK 4 kali/tahun;
4. Koordinasi dengan RT, RW, Trantib Kelurahan dan Kecamatan.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Jumlah Konflik SARA dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



**Gambar 2. 25 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan Tahun 2021**

### 2.3.1.16 Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

- 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021





Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pencari kerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$$

**Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
16.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat							
	16.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,1-6,4	6,1-6,4	6,87		2,4-3,5	6,74	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas, persentase realisasi TPT pada tahun 2021 sangat meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Bahkan angka tersebut sudah melampaui target RPJMD yakni sebesar 6,87.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), antara lain :

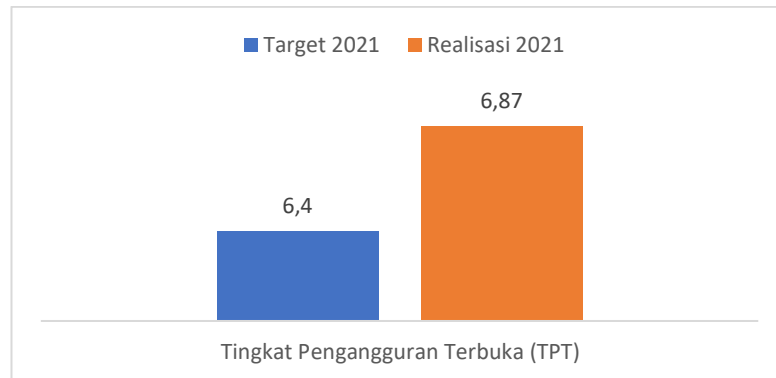
- a) Membuat inovasi kegiatan ketenagakerjaan yang dapat mendukung penyerapan tenaga kerja yang lebih baik;
- b) Meningkatkan program-program terkait pelatihan kompetensi yang lebih inovatif.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap



indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut



**Gambar 2. 26 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021**

### 2.3.1.17 Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Angka Kemiskinan

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2021

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Adapun Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan. Berikut ini merupakan tabel data angka kemiskinan yang menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Mojokerto:



**Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Indikator Angka Kemiskinan Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
17.1	Menurunnya Angka Kemiskinan							
	17.1.1 Angka Kemiskinan	5,84-6,04	5,84-6,04	6,39		5,25-5,70	6,24	-

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan target Angka Kemiskinan Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah 5,84 sampai 6,04, sedangkan realisasinya adalah 6,39. Sehingga Indikator Angka Kemiskinan telah tercapai, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Angka Kemiskinan

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada Angka Kemiskinan dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



**Gambar 2. 27 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Angka Kemiskinan Tahun 2021**

### 2.3.1.18 Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:



**a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

**1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  
Tahun 2021**

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Bahwa gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Adapun dalam upaya kesetaraan gender, terdapat komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *gender empowerment measurement* (GEM) yang merupakan Indikator penunjuk apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

IDG diukur berdasarkan 3 komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manager, administrasi dan teknisi serta sumbangan pendapatan. Pengukuran capaian kinerja indikator pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{1}{3} [Ipar + IDM + linc - dist]$$

Keterangan:

Xede (1) = Indeks keterwakilan di parlemen

Xede (2) = Indeks pengambilan keputusan

Linc-dis = Indeks distribusi pendapatan



**Tabel 2. 52 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
18.1	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan							
	18.1.1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91	91	0		83	81,99	98,78%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Data IDG Tahun 2021 belum dirilis oleh BPS, sehingga belum diketahui realisasinya.

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2021 belum dapat diketahui karena data dari BPS belum dirilis.

### 2.3.1.19 Sasaran Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Capaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

##### 1) Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2021

Kecenderungan kemandirian keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan kedua dimensi keuangan ini. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal.

Efektivitas keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas keuangan daerah. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi efektivitas keuangannya, tetapi dengan melihat trend positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju efektivitas keuangan daerah yang ideal.



Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\frac{\text{Pendapatan asli Daerah}}{\text{bantuan pemerintah pusat provinsi atau pinjaman}} \times 100$$

Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah dibagi bantuan pemerintah pusat atau provinsi atau pinjaman dikali 100.

Berikut adalah acuan untuk melihat tingkat rasio kemandirian keuangan daerah yang terdiri dalam empat pola hubungan yaitu, pola hubungan instruktif, pola hubungan konsultatif, pola hubungan partisipatif dan pola hubungan delegatif.

- a) Pola hubungan instruktif, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah.
- b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubungan partisipatif, yaitu peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.



**Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2021**

Sasaran dan Indikator Sasaran		Target RPJMD	Tahun 2021			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
19.1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah							
	19.1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	30,415	30,415	36,238	119,15%	25,898	35,447	136,87%

Sumber : Bagian Organisasi, 2022, diolah

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2021 yaitu 36,238 dengan capaian 119,15%. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto di tahun 2021 telah berhasil mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berdampak kepada peningkatan pendapatan daerah. Harapannya hal tersebut dapat mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

**Tabel 2. 54 Target dan Realisasi Komponen PAD**

No	Uraian	TA 2021 Setelah Perubahan		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pajak Daerah	50.034.000.000,00	52.376.571.219,20	104,68
2.	Retribusi Daerah	10.372.581.000,00	10.699.674.588,00	103,15
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.919.506.000,00	3.521.682.036,35	71,59
3.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.841.599.943,00	189.628.852.486,96	134,63
<b>Jumlah</b>		<b>206.167.686.943,00</b>	<b>256.226.780.330,51</b>	<b>124,28</b>

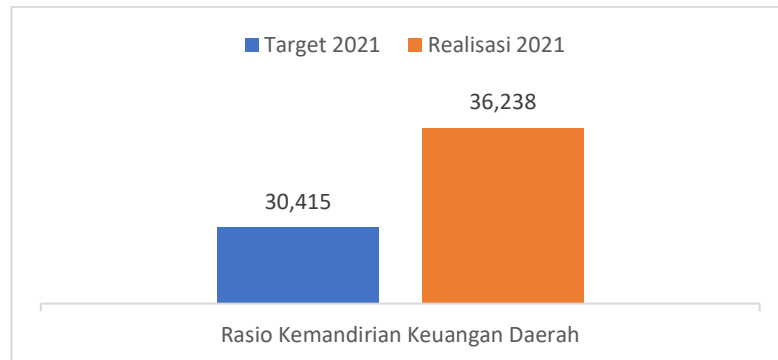
Sumber : BPKPD 2021

## 2) Perbandingan Target RPJMD dan Realisasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Target RPJMD dan realisasi kemudian dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui hasil kinerja dari masing-masing indikator. Perbandingan data dalam bentuk grafik dilakukan untuk memudahkan dalam membaca data secara rinci dan lebih jelas, terkait data target dengan kondisi realisasi. Target RPJMD setiap tahunnya mengalami perubahan guna meningkatkan capaian kinerja dalam setiap



indikator. Perbandingan data antara nilai realisasi dengan RPJMD pada rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat berdasarkan Grafik berikut.



**Gambar 2. 28 Perbandingan Target RPJMD Dan Realisasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2021**





## **BAB III**

# **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tujuan diberikannya Tugas Pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Implementasi Asas Tugas Pembantuan dalam pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota yaitu Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada kabupaten/kota, Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa. Pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021 dapat diuraikan sebagaimana di bawah ini.

### **3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 204);



- d. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 788 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021;
- e. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021, DIPA nomor: SP DIPA-090.02.4.055233/2021 tanggal 23 November 2021 oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu RI.

### 3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Pelaksanaan tugas pembantuan di Kota Mojokerto tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
Instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- b. Bidang Urusan Tugas Pembantuan  
Tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah urusan perdagangan.dalam negeri.
- c. Program dan Kegiatan  
Tugas pembantuan urusan perdagangan dilaksanakan melalui Program: Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan: Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan.
- d. Sumber dan Jumlah Anggaran  
Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan sumber anggaran berasal dari DIPA Nomor 090.02.4.055233/2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.000.000.000,-

### 3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Mojokerto mendapatkan tugas pembantuan sebanyak 1 (satu) program dan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan melalui Program: Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan.



### 3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kota Mojokerto mendapatkan tugas pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Adapun target dan realisasi kinerja fisik serta anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Target Kinerja

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto melalui Program: Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan. Keluaran dari kegiatan tersebut, yaitu jumlah pasar rakyat yang dibangun, target 1 unit dengan anggaran berdasarkan DIPA Nomor: 090.02.4.055233/2021 Tanggal 23 November 2020 sebesar Rp4.000.000.000,-

b. Realisasi

Pelaksanaan tugas pembantuan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Mojokerto telah terealisasi sebanyak 1 unit pasar rakyat atau capaiannya 100%. Sedangkan anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp3.285.570.805 atau capaiannya sebesar 82,14%. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto padatahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 3. 1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
1.	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	<p>1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penugasan Bupati/Walikota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 204);</p> <p>2. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 788 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non Sistem Resi Gudang yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021</p>	<p><b>Program:</b> Perdagangan Dalam Negeri</p> <p><b>Kegiatan:</b> Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan</p>	Jl. Raya Ketidur Kelurahan Surodinawan Kec Prajuritkulon Kota Mojokerto	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto	4.000.000.000	3.285.570.805	82,14	1 unit	100	<p>Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2021 terkait Langkah-langkah akhir tahun pengajuan LS Kontrak batas akhir pengajuan SPM tanggal 24 Desember 2021, dimana Kontrak berakhir tanggal 25 Desember 2021 sehingga penyedia harus membuat Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) untuk dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Penyedia belum melakukan penyerahan pekerjaan atau BAST kepada PPK sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2021, Penyedia mengajukan permohonan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan telah diselesaikan pada tanggal 15 Januari 2022. Penyelesaian pekerjaan melebihi tahun anggaran 2021 diselesaikan tahun anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/Pmk.05/2021 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022.</p>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



### 3.3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Nihil

### 3.3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto, dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan nomenklatur Satker, semula Dinas Perindustrian dan Perdagangan berubah menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, sehingga diperlukan perubahan revisi DIPA. Proses revisi DIPA memerlukan waktu sekitar 3 bulan. Hal ini menyebabkan proses lelang menjuadi mundur di Triwulan III dari jadwal semula di triwulan II.
- b. Penyedia belum melakukan penyerahan pekerjaan atau BAST kepada PPK sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2021. Sehingga penyelesaian pekerjaan melampaui tahun anggaran 2021.

### 3.3.4 Saran dan Tindak Lanjut

- a. Mengusulkan revisi DIPA kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Selanjutnya setelah revisi DIPA terbit, langsung dilakukan proses lelang;
- b. Penyedia mengajukan permohonan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 24 Januari 2022. Penyelesaian pekerjaan melebihi tahun anggaran 2021 diselesaikan tahun anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/Pmk.05/2021 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022.
- c. Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-9/PB/2021 terkait Langkah-langkah akhir tahun pencairan LS Kontrak batas akhir pengajuan SPM tanggal 24 Desember 2021, dimana Kontrak berakhir tanggal 25 Desember 2021 sehingga penyedia harus membuat Jaminan Pembayaran (Garansi Bank) untuk dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.



## **BAB IV**

# **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Hal ini merupakan amanat peraturan perundangan - undangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kota Mojokerto juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui perencanaan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

### **4.1 Urusan Pendidikan**

#### **4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

#### **4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah**

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan pendidikan baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar maupun kesetaraan sebagaimana tabel di bawah ini :



**Tabel 4. 1 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Pendidikan Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100
		Jumlah Warga Negara Usia 12 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100

#### 4.1.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan pendidikan berdasarkan jenis pelayanan dasar.

**Tabel 4. 2 Capaian SPM Urusan Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Dasar</b>						
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Orang	21.084	21.084	100	
	a. Buku Teks Pelajaran	Buah	19.602	19.602	100	
	b. Perlengkapan Belajar	Buah	19.602	19.602	100	
	c. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	78	68	87,17	
	d. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederaja	Orang	78	78	100	
	e. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	Rombel	724	724	100	
	f. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	Sekolah	90	89	98,89	
	g. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Orang	20.471	19.602	95,75	
	h. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	1.118	589	52,68	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Kesetaraan</b>						



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
2.	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipaisai dalam Pendidikan Kesetaraan	Orang	141	140	99,29	
a.	Modul Belajar	Buah	140	140	100	
b.	Perlengkapan Belajar	Buah	140	140	100	
c.	jumlah rombongan belajar di PKBM	Rombel	7	7	100	
d.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Orang	100	100	100	
e.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	28	25	89,29	
f.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	3	1	33,33	
g.	Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	Orang	3	3	100	
h.	PKBM Terakreditasi minimal C	Sekolah	3	0	0	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Anak Usia Dini</b>						
3.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipaisai Dalam Pendidikan PAUD	Orang	4336	4336	100	
a.	Buku Gambar	Buah	4752	4752	100	
b.	Alat Mewarnai	Buah	4752	4752	100	
c.	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	sekolah	137	104	75.91	
d.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Orang	4752	4752	100	
e.	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	137	40	29.90	
f.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	Orang	268	259	96.64	
g.	jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	Rombel	268	268	100,0	

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasinya tahun 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

**Tabel 4. 3 Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan %
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Anak Usia Dini</b>				
1	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>4.160.196.745</b>	<b>3.301.689.953</b>	<b>79,36</b>





No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan %
	a. Pengadaan Perlengkapan PAUD			
	b. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	241.590.195	198.598.000	<b>82,20</b>
	c. Penyediaan biaya personil peserta didik PAUD	3.918.606.550	3.103.091.953	<b>79,19</b>
	d. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD			
	e. Penyelenggaraan proses belajar PAUD			
	f. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD			
	g. Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD			
	h. Pembinaan keembagaan dan manajemen PAUD			
	i. Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUD			
	j. Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD			
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Dasar</b>				
<b>2.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Dasar</b>	<b>16.406.149.664</b>	<b>15.056.848.009</b>	<b>91,78</b>
	a. Pengadaan perlengkapan sekolah			
	b. Pengadaan perlengkapan siswa			
	c. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			
	d. Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	16.144.129.664	14.862.931.209	92,06
	e. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar			
	f. Pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar			
	g. Perhitungan dan pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar			
	h. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			
	i. Penambahan ruang kelas baru			
	j. Pengelolaan Manajemen Data Pendidikan			
	k. Penyediaan beasiswa untuk siswa miskin			



No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan %
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Sekolah Menengah Pertama</b>				
3.	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>16.211.998.131</b>	<b>14.752.771.052</b>	<b>91,00</b>
a.	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	15.813.448.540	14.385.602.052	90,97
b.	Perlengkapan dasar buku teks peserta didik			
c.	Perlengkapan belajar peserta didik			
d.	Pengadaan perlengkapan siswa	398.549.591	367.169.000	<b>92,13</b>
e.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			
f.	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik			
g.	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama			
h.	Pengembangan kariir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama			
i.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah			
j.	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah			
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pendidikan Kesetaraan</b>				
4.	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan</b>	<b>180.600.000</b>	<b>180.150.000</b>	<b>99,75</b>
a.	Penyediaan biaya personil peserta didik Non Formal / Kesetaraan	180.600.000	180.150.000	<b>99,75</b>
b.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa non formal / kesetaraan			
c.	Penyelenggaraan proses belajar non formal / kesetaraan			
d.	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan			
e.	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal / kesetaraan			



No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan %
f.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal / kesetaraan			
g.	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal /kestaraan			
h.	Pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru pendidikan non formal/kesetaraan			
i.	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru pendidikan non formal/kesetaraan			
j.	Pemeliharaan rutin gedung/druang kelas/ruang guru non formal/kesetaraan			
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>36.958.944.540</b>	<b>33.291.459.014</b>	<b>90,08</b>

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil untuk Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sebanyak 1.913 personil dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. 4 Personil Berdasarkan Jenis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2021**

No.	Uraian	PNS	Honorer	Jumlah
<b>1</b>	<b>Pendidik</b>	<b>721</b>	<b>686</b>	<b>1.407</b>
	a. Guru/GTT PAUD	67	290	357
	b. Guru/GTT SD	372	264	636
	c. Guru/GTT SMP	280	141	421
<b>2</b>	<b>Tenaga Kependidikan</b>	<b>47</b>	<b>405</b>	<b>452</b>
	a. PTT PAUD	-	71	71
	b. PTT SD	-	193	193
	c. PTT SMP	-	141	141
<b>3</b>	<b>Pejabat dan Personil Dinas</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>49</b>
<b>4</b>	<b>Pengawas Pendidikan</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>822</b>	<b>1.091</b>	<b>1.913</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022, diolah

**Tabel 4. 5 Personil PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Jenis	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA	
1	Pendidik	49	648	15	-	5	4	721
2	Tenaga Kependidikan	-	14	18	-	4	11	47



No	Jenis	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1/D4	D3	D2	D1	SMA	
3	Pejabat dan Personel Dinas	8	20	6	-	3	12	49
4	Pengawas Pendidikan	5	-	-	-	-	-	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan tahun 2021 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, sebagai berikut:

**Tabel 4. 6 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan Kota Mojokerto Tahun 2021**

PERMASALAHAN			SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:		
2.	Penghitungan Kebutuhan:		
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	Perencanaan dan penganggaran berubah-ubah karena terjadi 4 kali perubahan mulai dari Refocussing, Pergeseran, PAK serta efisiensi	
4.	Pelaksanaan:	Pelaksanaan berjalan lancar walaupun ada beberapa tidak sesuai jadwal dikarenakan priortas serta kebijakan PPKM pandemi covid-19	
5.	Pelaporan:		
6.	Lain-Lain:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Pendidik : Untuk kebutuhan tenaga pendidik dalam SPM sesuai dengan Permendikbud 32 Tahun 2018 antara lain dengan kriteria : Sudah berijazah S1/D4 dan mempunyai sertifikat pendidik. Di Kota Mojokerto hampir seluruh tenaga pendidik sudah berijazah S1/D4 akan tetapi masih ada beberapa yang belum mempunyai sertifikat pendidik dan untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus mengikuti diklat peningkatan kompetensi guru dengan jumlah kuota sudah ditentukan oleh Pusat;</li> <li>2. Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah): Untuk kebutuhan tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) dalam SPM sesuai dengan Permendikbud 32 Tahun 2018 antara lain dengan kriteria: Sudah berijazah S1/D4, mempunyai sertifikat pendidik, dan mempunyai sertifikat lulus pelatihan calon Kepala Sekolah. Di Kota Mojokerto untuk Tenaga Kependidikan (Kepala</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus mendorong dan mengusulkan guru - guru tersebut utk bisa segera memperoleh sertifikat tersebut.</li> <li>2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto akan terus mendorong dan mengusulkan untuk kepala sekolah yang belum mempunyai sertifikat tersebut sesuai dengan kuota dari Pusat</li> </ol>



		Sekolah) sudah berijazah S1/D4 semua dan hampir semuanya sudah bersertifikat pendidik juga dan hanya beberapa yang belum mempunyai Sertifikat kelulusan pelatihan calon kepala sekolah dan semuanya berasal dari lembaga sekolah swasta	
--	--	---	--

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

## 4.2 Urusan Kesehatan

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan kesehatan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 7 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Kesehatan Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100

#### 4.2.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan pendidikan berdasarkan jenis pelayanan dasar.

**Tabel 4. 8 Capaian SPM Urusan Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan ibu hamil</b>						
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2141	1983	92.62	
	a. Vaksin Tetanus Difetri (Td)	Vaksin	2141	1983	92.62	
	b. Tablet Tambah Darah	Tablet	2141	1983	92.62	
	c. Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Alat	2141	1983	92.62	
	d. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	Kartu	2141	1983	92.62	
	e. Buku KIA	Buku	2141	1983	92.62	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan ibu bersalin</b>						
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2043	1984	97.11	
	a. Formulir Fotograf	Lembar	2043	1984	97.11	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
	b. Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	Kartu	2043	1984	97.11	
	c. Buku KIA	Buku	2043	1984	97.11	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>						
3	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Bayi	1946	1918	98.56	
	a. Vaksin Hepatitis BO	Vaksin	1946	1918	98.56	
	b. Vitamin K1 Injeksi	Vitamin	1946	1918	98.56	
	c. Salep/Tetes Mata Antibiotik	Salep	1946	1918	98.56	
	d. Formulir Bayi Baru Lahir	Lembar	1946	1918	98.56	
	e. Formulir MTBM	Lembar	1946	1918	98.56	
	f. Buku KIA	Buku	1946	1918	98.56	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan balita</b>						
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Balita	7946	7946	100	
	a. Kuisiener Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	Kuisiener	7946	7946	100	
	b. Formulir DDTK	Lembar	7946	7946	100	
	c. Buku KIA	Buku	7946	7946	100	
	d. Vitamin A Biru	Vitamin	7946	7946	100	
	e. Vitamin A Merah	Vitamin	7946	7946	100	
	f. Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell	Vaksin	7946	7946	100	
	g. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	Vaksin	7946	7946	100	
	h. Jarum Suntik dan BHP	Jarum Suntik	7946	7946	100	
	i. Peralatan Anafilaktik	Alat	7946	7946	100	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>						
5	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Orang	15926	15926	100	
	a. Buku Raport Kesehatanku	Buku	15926	15926	100	
	b. Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	15926	15926	100	
	c. Kuesioner Skrining Kesehatan	Lembar	15926	15926	100	
	d. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	Lembar	15926	15926	100	
	e. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Lembar	15926	15926	100	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan pada usia produktif</b>						



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	87498	75955	86.81	
	a. Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	Pedoman	87498	75955	86.81	
	b. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Lembar	87498	75955	86.81	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</b>						
7	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	15725	14648	93.15	
	a. Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	Strip	15725	14648	93.15	
	b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Alat	15725	14648	93.15	
	c. Buku Kesehatan Lansia	Buku	15725	14648	93.15	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</b>						
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	37160	29496	79.38	
	a. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	Buku	37160	29766	80.10	
	b. Tensimeter	Alat	37160	29766	80.10	
	c. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	Lembar	37160	29766	80.10	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</b>						
9	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	5058	5058	100	
	a. * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	Alat	5058	5058	100	
	b. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	Lembar	5058	5058	100	
	c. Pedoman dan Media KIE	Buku	5058	5058	100	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat</b>						
10	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	Orang	249	249	100	





No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
	a. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	249	249	100	
	b. Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	Alat	249	249	100	
	c. Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Lembar	249	249	100	
	d. Media KIE	Alat	249	249	100	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis</b>						
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2446	2446	100	
	a. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Lembar	2446	2446	100	
	b. Reagen Zn TB	Alat	2446	2446	100	
	c. Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	Masker	2446	2446	100	
	d. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng	Alat	2446	2446	100	
	e. Catridge Tes Cepat Molekuler	Alat	2446	2446	100	
	f. Formulir Pencatatan dan Pelaporan	Lembar	2446	2446	100	
	g. Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Buku	2446	2446	100	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>						
12	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus ) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	Orang	3254	3254	100	
	a. Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	Lembar	3254	3254	100	
	b. Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	Alat	3254	3254	100	
	c. Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	Alat	3254	3254	100	



#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasinya tahun 2021 pada Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto.

**Tabel 4. 9 Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>3.389.177.471</b>	<b>2.433.782.286</b>	71,81
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	214.562.494	185.181.670	86,31
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	325.271.737	120.119.200	36,93
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	27.761.539	26.700.900	96,18
	Pelayanan Kesehatan Balita	d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	203.356.462	173.596.800	85,37
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	241.026.447	198.721.281	82,45
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	234.574.741	202.619.400	86,38
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	306.012.534	289.525.563	94,61
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	295.035.341	130.251.200	44,15
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	588.824.455	571.919.542	97,13
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	135.542.491	81.278.336	59,97
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	300.604.164	146.772.018	48,83
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	516.605.066	307.096.376	59,45
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>3.389.177.4710</b>	<b>2.433.782.286</b>	<b>71,81</b>



#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut:

**Tabel 4. 10 Personil pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Penempatannya	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	16
3.	Bidang P2P	9
4.	Bidang Kesmas	9
5.	Bidang PSDK	8
6.	Tenaga Medis	33
7.	Tenaga Paramedis	221
	<b>J u m l a h</b>	<b>291</b>

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 4. 11 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan Kota Mojokerto Tahun 2021**

PERMASALAHAN			SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:	pengumpulan data SPM berjalan lancar dan setiap triwulan ada rekapitulasi datanya	-
2.	Penghitungan Kebutuhan:	penghitungan kebutuhan tidak ada kendala	Melakukan perhitungan kebutuhan prioritas pada peningkatan SPM Kesehatan disamping pencegahan dan pengendalian covid-19
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	penyerapan anggaran berjalan lambat karena pagu anggaran SPM selalu berubah-ubah karena pergeseran, refocusing, PAK dan efisiensi;	berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto untuk kelancaran



			pelaksanaan anggaran SPM
4.	Pelaksanaan:	pelaksanaan kegiatan SPM berjalan lancar walaupun tidak sesuai jadwal dikarenakan priortas penanganan covid dan vaksinasi	membuat rencana kerja dan pembagian SDM untuk penanganan Covid dan SPM sehingga dapat berjalan bersama dengan baik
5.	Pelaporan:	-	-
6.	Lain-Lain:	-	-

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan pekerjaan umum sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 12 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100

#### 4.3.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan pekerjaan umum berdasarkan jenis pelayanan dasar.



**Tabel 4. 13 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>						
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	Orang	42500	40271	94.76	
	a. Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Pelayanan	5147	5147	100	
	b. Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Pelayanan	58	58	100	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik</b>						
2	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Orang	42500	41919	98.63	
	a. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	Pelayanan	3659	3078	84.12	
	b. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	Pelayanan	1	1	100	
	c. Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	Pelayanan	120	120	100	

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasinya tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.



**Tabel 4. 14 Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan (%)	KET
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>					
1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.253.755.245</b>	<b>722.677.987</b>	<b>57,64</b>	
	a. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	1.253.755.245	722.677.987	57,64	
	b. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan				
	c. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan				
	d. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan				
	e. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan				
	f. Pembangunan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan				
	g. Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan				
	h. Perluasan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan				
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</b>					
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.253.755.245</b>	<b>722.677.987</b>	<b>57.64</b>	
	a. Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota				
	b. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota				
	c. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman				
	d. Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat				
	e. Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman				
	f. Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja				
	g. Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja				
	h. Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT				
	i. Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT				
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>2.507.510.490</b>	<b>1.445.355.974</b>	<b>57.64</b>	

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :



**Tabel 4. 15 Personil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (Bidang Pekerjaan Umum) Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Penempatannya	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	6
3.	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penempatan Tenaga Kerja	2
4.	Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum	4
<b>J u m l a h</b>		<b>13</b>

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum tahun 2021 di sebagai berikut:

**Tabel 4. 16 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021**

PERMASALAHAN			SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:	Pengumpulan data SPM berjalan lancar	
2.	Penghitungan Kebutuhan:	Penghitungan kebutuhan dari bidang berjalan lancar	
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	Penyerapan anggaran berjalan lancar	
4.	Pelaksanaan:	Kurangnya minta warga Kota Mojokerto untuk mengikuti program kegiatan pemasangan/ Penyambungan Sambungan air minum oleh PDAM dan Kurang baiknya kualitas air dan pelayanan yang diberikan oleh PDAM	
5.	Pelaporan:		
6.	Lain-Lain:		

#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:



- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan perumahan rakyat sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 17 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100

#### 4.4.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan perumahan rakyat berdasarkan jenis pelayanan dasar.

**Tabel 4. 18 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Penyediaan &amp; rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota</b>						
1	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	Orang	0	0	0	
	a. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0	0	0	
	b. Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	Rumah	0	0	0	
	c. Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	Rumah	0	0	0	
	d. Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	Rumah	0	0	0	
<b>Jenis Layanan Dasar : Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota</b>						
2	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program	Orang	54	54	100	





No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
	Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					
a.	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	Fasilitas	0	0	0	
b.	Subsidi Uang Sewa	Dana	0	0	0	
c.	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	54	54	100	

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasi SPM bidang perumahan rakyat tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto

**Tabel 4. 19 Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan
5	Kegiatan Lainnya			
a	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (REHABILITASI RUSUNAWA)	1.162.486.250	1.005.972.915	86,54
b	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (Bantuan Rumah Swadaya) bagi MBR	1.837.500.000	1.813.000.000	98,67
	<b>Jumlah</b>	<b>2.999.986.250</b>	<b>2.818.972.915</b>	<b>93,97</b>

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :

**Tabel 4. 20 Personil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Bidang Perumahan Rakyat) Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Penempatannya	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	6



No	Penempatannya	Jumlah
3.	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Penempatan Tenaga Kerja	2
4.	Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana Utilitas Umum	4
	J u m l a h	13

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat tahun 2021 di sebagai berikut:

**Tabel 4. 21 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Mojokerto Tahun 2021**

PERMASALAHAN		SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:	Pengumpulan data SPM berjalan lancar
2.	Penghitungan Kebutuhan:	Penghitungan kebutuhan dari bidang berjalan lancar
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	perencanaan dan penganggaran terkena recofusing covid-19
4.	Pelaksanaan:	kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan terkena recofusing covid19 kegiatan penghunian rusunawa tidak dapat dilaksanakan dikarenakan gedung dipakai tempat untuk rehabilitasi pasien covid 19
5.	Pelaporan:	
6.	Lain-Lain:	

#### 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

##### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana



- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

#### 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 22 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100

#### 4.5.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan jenis pelayanan dasar.

**Tabel 4. 23 Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi</b>						
1	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Kegiatan	5276	5276	100%	
	a. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	1	1	100%	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	b. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	Orang	1	1	100%	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu</b>						
2	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Kegiatan	5276	5276	100 %	
	a. Penegakan Perda sesuai SOP	Kegiatan	5	5	100%	
	b. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	Kegiatan	5	5	100%	
	c. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	Kegiatan	5	5	100%	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan informasi rawan bencana</b>						
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	18160	18160	100	
	a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Kegiatan	1	1	100	
	b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Kegiatan	18160	18160	100	
	c. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	Kegiatan	18160	18160	100	
	d. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Kegiatan	18	18	100	
	e. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	Kegiatan	1	1	100	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>						
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	18160	18160	100	
	a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	18160	18160	100	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>						
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1	1	100	
	a. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	Orang	1	1	100,00	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
b.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Data	10	10	100,00	
c.	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	Kegiatan	1	1	100,00	
d.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Kegiatan	1	1	100,00	
e.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Kegiatan	1	1	100,00	
f.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	Kegiatan	1	1	100,00	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>						
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	23	23	100.00	
a.	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	Kegiatan	50	50	100.00	
b.	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	Kegiatan	1	1	100.00	

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasi SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto tahun 2021.

**Tabel 4. 24 Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	KET
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>					
1	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	634,710,000	614,433,000	96.81 %	
a.	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	634,710,000	614,433,000	96.81 %	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>					



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	KET
2	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0	0	0 %	
	a. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	0	0	0 %	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>					
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	191,624,827	162,384,900	84.74 %	
	a. Penyajian kajian resiko bencana kabupaten/kota				
	b. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana)	191,624,827	162,384,900	84.74 %	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>					
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	118,032,450	84,186,350	71.32 %	
	a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota				
	b. Penyusunan rencana kontijensi				
	c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	118,032,450	84,186,350	71.32 %	
	d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana				
	e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap kabupaten/kota				
	f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>					
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	495,241,701	465,584,032	94.01 %	
	a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas				
	b. Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	0	0	0	
	c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana				
	d. Pengadaan perlengkapan siswa				
	e. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyela matan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	495,241,701	465,584,032	94.01 %	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					
6	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	575,051,951	525,547,500	91.39 %	
	a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	575,051,951	525,547,500	91.39 %	
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>2,014,660,929</b>	<b>1,852,135,782</b>	<b>91.93 %</b>	



#### 4.5.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut:

**Tabel 4. 25 Personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Penempatan	Jumlah
1.	Kepala Satpol PP Kota Mojokerto	1
2.	Sekretariat Satpol PP	11
3.	Bidang Perlindungan Masyarakat	7
4.	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban	6
5.	Komandan Petugas Keamanan	15
6.	Petugas Keamanan	25
7.	Pengelola Keamanan dan Ketertiban (Pamwal)	2
8.	Plt.Kepala UPT.Pemadam Kebakaran	1
9.	Pranata Pemadam Kebakaran	9
	<b>JUMLAH</b>	<b>77</b>

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021 di sebagai berikut:

**Tabel 4. 26 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto Tahun 2021**

PERMASALAHAN			SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:	Belum adanya dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana), Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana), dan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) • Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana belum dilaksanakan	Akan dilaksanakan penyusunan Dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana), Dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana), Rencana Kontijensi (Renkon) • Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana
2.	Penghitungan Kebutuhan:	Kualitas dan kuantitas personil Satpol PP kurang memadai	Peningkatan kompetensi personil



PERMASALAHAN			SOLUSI
			Satpol PP, baik secara kualitas maupun kuantitas
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	<p>1. Tidak tersedianya anggaran Diklat PPNS untuk personil Satpol PP</p> <p>2. Anggaran peningkatan kompetensi personil Satpol PP kurang memadai</p> <p>Anggaran sarpras terkait indikator kebencanaan kurang memadai</p>	Akan menganggarkan Diklat PPNS bagi personil Satpol PP guna untuk mendukung peningkatan Kinerja dan kualitas SDM Sapol PP
4.	Pelaksanaan:	Perkembangan pembangunan daerah menuntut peran SATPOL PP yang semakin strategis dan menuntut peningkatan kinerja yang benar-benar optimal. Ditengah keterbatasan dana maupun jumlah personil yang dimiliki, baik secara kualitas maupun kuantitas, Satpol PP dituntut untuk terus memperbaiki manajemen serta pendekatan yang seharusnya dikembangkan menyikapi meningkatnya tantangan yang dihadapi di lapangan.	<p>1. Penggunaan pendekatan yang humanis yang lebih menonjolkan persuasif daripada prefentif merupakan strategi yang tepat untuk penegakan ketertiban umum.</p> <p>2. Sosialisasi Perda dan Perwali kepada masyarakat melalui media online ( instagram, facebook, dll ) dan offline ( pamflet, mobil keliling, dll)</p> <p>Mengusulkan penambahan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP baik penambahan sarana dan prasarana maupun anggota Satpol PP</p>
5.	Pelaporan:	Tidak ada	
6.	Lain-Lain:	Salah satu faktor penyebab kurang efektifnya Pelaksanaan Perda ditingkat masyarakat adalah belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi Perda yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai - nilai atau aturan - aturan yang terkandung dalam Perda. Maka bagi Satpol PP upaya untuk menegakkan pelaksanaan Perda menjadi lebih sulit	Akan terus melaksanakan sosialisasi Perda dan Perwali agar warga masyarakat memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai - nilai atau aturan - aturan yang terkandung dalam Perda dan Perwali





## 4.6 Urusan Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Kota Mojokerto urusan sosial sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 27 Target SPM Kota Mojokerto Urusan Sosial Tahun 2021**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100

### 4.6.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2021, berikut capaian SPM urusan sosial berdasarkan jenis pelayanan dasar.



**Tabel 4. 28 Capaian SPM Urusan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial</b>						
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	30	30	100%	
a.	Layanan Data dan Pengaduan	Kegiatan	2	2	100%	
b.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Kegiatan	1	1	0	
c.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Kegiatan	0	0	0%	
d.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Kegiatan	0	0	0	
e.	Penyediaan Permakanan	Kegiatan	1	1	100%	
f.	Penyediaan Sandang	Kegiatan	1	1	0	
g.	Penyediaan Alat bantu	Kegiatan	30	30	100%	
h.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kegiatan	1	1	100%	
i.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Kegiatan	1	1	100%	
j.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Kegiatan	1	1	100%	
k.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Kegiatan	1	1	100%	
l.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Alat	1	1	100%	
m.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Kegiatan	1	1	100%	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	n. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kegiatan	1	1	100%	
	o. Layanan Rujukan	Kegiatan	1	1	100%	
	p. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Kegiatan	0	0	0	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial</b>						
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	1	1	100	
	a. Layanan Data dan Pengaduan	Kegiatan	2	2	100	
	b. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Kegiatan	1	1	100	
	c. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Kegiatan	0	0	0	
	d. Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Kegiatan	0	0	0	
	e. Penyediaan Permakanan	Kegiatan	1	1	100	
	f. Penyediaan Sandang	Kegiatan	1	1	100	
	g. Penyediaan Alat bantu	Kegiatan	1	1	100	
	h. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kegiatan	1	1	100	
	i. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Kegiatan	1	1	100	
	j. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Kegiatan	1	1	100	
	k. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta	Kegiatan	1	1	100	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak					
l	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Kegiatan	1	1	100	
m.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Kegiatan	1	1	100	
n.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kegiatan	1	1	100	
o.	Layanan Rujukan	Kegiatan	1	1	100	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial</b>						
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	55	55	100%	
a.	Layanan Data dan Pengaduan	Kegiatan	2	2	100%	
b.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Kegiatan	1	1	100%	
c.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Kegiatan	0	0	0	
d.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Kegiatan	0	0	0	
e.	Penyediaan Permakanan	Kegiatan	24	24	100%	
f.	Penyediaan Sandang	Kegiatan	24	24	100%	
g.	Penyediaan Alat bantu	Kegiatan	2	2	100%	
h.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kegiatan	12	12	100%	
i.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Kegiatan	55	55	100%	
j.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Kegiatan	55	55	100%	
k.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta	Kegiatan	1	1	100%	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak					
l	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Kegiatan	12	12	100%	
m.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Kegiatan	3	3	100%	
n.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kegiatan	4	4	100%	
o.	Layanan Rujukan	Kegiatan	15	15	100%	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>						
4	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	16	16	100%	
a.	Layanan Data dan Pengaduan	Kegiatan	2	2	100%	
b.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Kegiatan	1	1	100%	
c.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Kegiatan	0	0	0	
d.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Kegiatan	0	0	0	
e.	Penyediaan Permakanan	Kegiatan	16	16	100%	
f.	Penyediaan Sandang	Kegiatan	1	1	100%	
g.	Penyediaan Alat bantu	Kegiatan	1	1	100%	
h.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kegiatan	16	16	100%	
i.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Kegiatan	16	16	100%	
j.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Kegiatan	16	16	100%	
k.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu	Kegiatan	1	1	100%	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
	Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak					
	l Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Kegiatan	16	16	100%	
	m. Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Kegiatan	1	1	100%	
	n. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kegiatan	1	1	100%	
	o. Layanan Rujukan	Kegiatan	1	1	100%	
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota</b>						
5	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Orang	11.143	11.143	100%	
	a. Penyediaan Permakanan	Kegiatan	11.131	11.131	100%	
	b. Penyediaan Sandang	Kegiatan	12	12	100%	
	c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kegiatan	1	1	100%	
	d. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kegiatan	1	1	100%	
	e. Pelayanan Dukungan Psikososial	Kegiatan	1	1	100%	

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Berikut tabel pengalokasian anggaran dan realisasi SPM bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Kota Mojokerto tahun 2021.

**Tabel 4. 29 Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan	AKSI
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial</b>					
1	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	<b>77,568,400</b>	<b>66,971,667</b>	<b>86.34</b>	
	a. Layanan Data dan Pengaduan	77,568,400	66,971,667	86.34	
	b. Layanan kedaruratan				
	c. Penyediaan permakanan				
	d. Penyediaan sandang				
	e. Penyediaan alat bantu				
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan				



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan	AKSI
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial				
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas teralntar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat				
	i. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak				
	j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar				
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				
	m. Layanan rujukan				
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial</b>					
2	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	2,279,846,872	2,096,441,367	91.96 %	
	a. Layanan Data dan Pengaduan	77,568,400	66,971,667	86.34	
	b. Layanan kedaruratan				
	c. Penyediaan permakanan				
	d. Penyediaan sandang	2,202,278,432	2,096,441,367	92.15 %	
	e. Penyediaan alat bantu				
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan				
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial				
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas teralntar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat				
	i. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak				
	j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar				
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan	AKSI
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				
	m. Layanan rujukan				
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial</b>					
3	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	a. Layanan Data dan Pengaduan				
	b. Layanan kedaruratan				
	c. Penyediaan permakanan				
	d. Penyediaan sandang				
	e. Penyediaan alat bantu				
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan				
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial				
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis, dan masyarakat				
	i. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak				
	j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar				
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				
	l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga				
	m. Layanan rujukan				
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>					
4	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>7,509,928,440</b>	<b>5,724,607,600</b>	<b>76.23 %</b>	
	a. Layanan Data dan Pengaduan				
	b. Layanan kedaruratan				
	c. Penyediaan permakanan	7,509,928,440	5,724,607,600	76.23 %	
	d. Penyediaan sandang				
	e. Penyediaan alat bantu				
	f. Penyediaan perbekalan kesehatan				
	g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial				





No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Serapan	AKSI
	h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis, dan masyarakat				
	i. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak				
	j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar				
	k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga				
	l. Pemberian pelayanan reuifikasi keluarga				
	m. Layanan rujukan				
<b>Jenis Pelayanan Dasar : Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota</b>					
	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota</b>	0	0	0	
	a. Penyediaan Permakanan				
	b. Penyediaan Sandang				
	c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				
	d. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan				
	e. Pelayanan Dukungan Psikososial				
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>9,867,343,712</b>	<b>7,888,020,634</b>	<b>79.94 %</b>	

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut dilakukan dengan dukungan personil sebagai berikut :

**Tabel 4. 30 Personil pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Mojokerto Tahun 2021**

No	Penempatannya	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	14



No	Penempatannya	Jumlah
3.	Bidang Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	25
4.	Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial	48
5.	Bidang Bina Pemberdayaan Sosial	20
	<b>J u m l a h</b>	<b>108</b>

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Sosial tahun 2021 di sebagai berikut:

**Tabel 4. 31 Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kota Mojokerto Tahun 2021**

PERMASALAHAN		SOLUSI
1.	Pengumpulan Data:	
2.	Penghitungan Kebutuhan:	
3.	Perencanaan dan Penganggaran:	
4.	Pelaksanaan:	
5.	Pelaporan:	
6.	Lain-Lain:	Berdasarkan hasil Assesment terhadap Penyandang Disabilitas bahwa yang dibutuhkan oleh mereka adalah Alat Bantu sehingga tidak menganggarkan bantuan penyediaan permakanan, dan sandang bagi Penyandang Disabilitas yang memperoleh bantuan
		Tahun depan akan diberikan seluruh bantuan sesuai PERMENSOS